



**PENGARUH PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN, INVESTASI,  
DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN  
TENAGA KERJA DI PULAU SUMATERA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Disusun Oleh :**

**DEVI RIA SARI SIMANJUNTAK**

**C1A019124**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**

**JURUSAN ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Ria Sari Simanjuntak  
Nomor Mahasiswa : C1A019124  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan, Investasi dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini adalah karya asli penulis, selama proses penulisan tidak melakukan kegiatan plagiat atas karya ilmiah orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi ini sesungguhnya ada dan disiapkan oleh kaedah ilmiah penulisan.
2. Bila dikemudian hari didapati ketidaksesuaian sebagaimana pada poin (1) makasaya siap menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 2023

Yang membuat pernyataan

Devi Ria Sari Simanjuntak  
NIM. C1A019124

## **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Devi Ria Sari Simanjuntak  
Nomor Mahasiswa : C1A019124  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan, Investasi dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam Ujian Komprehensif dan skripsi pada tanggal seperti tertera dibawah ini :

Jambi, 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Drs. H. Zulgani, M.P**  
NIP. 196205161987031018

**Dra. Rahma Nurjanah, M.E.**  
NIP. 196402271989022001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

**Dr. Hj. Etik Umivati, S.E., M.Si.**  
NIP. 196807091993032002

## **LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Komprehensif dan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 10 November 2023  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian 2 FEB Gedung Dekanat Lantai 1

### **TIM PENGUJI**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua	Dr. Dra. Hj. Heriberta, M.E	
Penguji Utama	Selamet Rahmadi, S.E.,M.Si	
Sekretaris	Rosmeli, S.E., M.E	
Anggota	Dr. Drs. H. Zulgani, M.P	
Anggota	Dra. Rahma Nurjanah, M.E	

**Disahkan Oleh:**

**Dekan FEB**

**Ketua Jurusan**

**Prof. H. Dr. Junaidi, S.E., M.Si.**  
NIP. 196706021992031003

**Dr. Drs. Zulgani, M.P.**  
NIP. 196205161987031018

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan, Investasi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat penulisan skripsi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu tidak ada ungkapan yang tulus selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua saya tercinta dan sayangi, yaitu Bapak R. V Simanjuntak dan Mamak D. S Tampubolon yang tiada henti selalu mendoakan dan memotivasi penulis serta memberikan segala kebutuhan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Jambi.
3. Bapak Dr. H. Junaidi, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Etik Umiyati, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
5. Bapak Dr. Drs. Zulgani, M.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan sebagai Pembimbing Skripsi I saya yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Rahma Nurjanah, M.E sebagai Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

7. Ibu Dr. Nurhayani, S.E., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, pengarahan, serta motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Jambi
8. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan berharga bagi penulis selama perkuliahan serta jajaran karyawan dan staf Universitas Jambi yang telah melayani dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Kepada teman-temanku para bangsul Anggun Kristina, Martina Mulyatiwi Pandiangan, dan Yunita Putri Sitohang yang telah bersama sejak awal perkuliahan sampai sekarang yang sedang berjuang dalam menyelesaikan studi serta menemani dan selalu memberi motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman disaat senang maupun sedih yaitu Oca Rosyanna dan Angelina Martha Yuniar Hutahean yang telah menemani dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga membuat skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan yang bersifat membangun dan mengarah pada peningkatan mutu penulis.

Jambi, 2023

Devi Ria Sari Simanjuntak  
C1A019124

## ABSTRAK

Permasalahan yang paling sering di alami oleh negara berkembang yaitu sesuatu yang berhubungan erat dengan masalah ketenagakerjaan. Masalah yang dihadapi yaitu adanya peningkatan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan angka pengangguran. Penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Apabila penyerapan tenaga kerja meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu PDRB sektor industri pengolahan, investasi, dan upah minimum provinsi. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri pengolahan, investasi, upah, dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera. Selain itu juga untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri pengolahan, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan model regresi panel. Model estimasi yang digunakan yaitu dengan model terbaik Random Effect Model dengan bantuan program E-views 12.

Dari penelitian diperoleh rata-rata perkembangan variabel PDRB sektor industri pengolahan adalah sebesar 3,22%, lalu pada variabel Investasi memiliki rata-rata perkembangan sebesar 12,03%, kemudian variabel UMP memiliki rata-rata perkembangan sebesar 5,32% dan rata-rata perkembangan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 yaitu sebesar 5,93%. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil analisis regresi data panel dengan model Random Effect Model (REM), diperoleh bahwa variabel produk domestik regional bruto sektor industri pengolahan dan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera, sedangkan variabel investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera. Penelitian ini sudah banyak diteliti sebelumnya sehingga penelitian ini melibatkan penelitian sebelumnya dengan adanya perbedaan lokasi penelitian, waktu penelitian yang berbeda dan variabel-variabel penelitian sehingga akan menghasilkan kebaruan pada penelitian ini.

**Kata Kunci: PDRB, Sektor industri pengolahan, Investasi, Upah Minimum Provinsi, Penyerapan tenaga kerja**

## **ABSTRACT**

*The problems most often experienced by developing countries are something that is closely related to employment issues. The problem faced is that an increase in the labor force that is higher than labor absorption will increase the unemployment rate. Labor absorption can be used as an indicator of the success of a region's development. If labor absorption increases, the level of community welfare will also increase. Factors that influence labor absorption are GRDP in the processing industry sector, investment, and provincial minimum wages. So this research aims to analyze the development of gross regional domestic product (GRDP) in the processing industry sector, investment, wages and labor absorption on the island of Sumatra. Apart from that, it is also to analyze the influence of gross regional domestic product (GRDP) in the processing industry sector, investment and wages on labor absorption. The analytical tools used are descriptive analysis and quantitative analysis with a panel regression model. The estimation model used is the best Random Effect Model with the help of the E-views 12 program.*

*From the research, it is known that the average development of the GRDP variable in the processing industry sector is 3.22%, then the Investment variable has an average development of 12.03%, then the provincial minimum wage variable has an average development of 5.32% and the average The average development of labor absorption on the island of Sumatra in 2017-2022 was 5.93%. The research results show that the results of panel data regression analysis using the Random Effect Model (REM) show that the variables of gross regional domestic product in the processing industry sector and provincial minimum wages have a positive and significant influence on labor absorption on Sumatra Island, while the investment variable has a negative influence. and significant for labor absorption on the island of Sumatra. This research has been researched a lot before so this research involves previous research with different research locations, research times and different research variables so that it will produce novelty in this research.*

**Keywords: Gross Regional Domestic Product (GRDP), Provincial Minimum Wage (PMW), Investment, Labor Absorption.**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Industri Pengolahan .....	12
2.1.2 Tenaga Kerja.....	14
2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja.....	17
2.1.4 Permintaan Tenaga Kerja.....	18
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi .....	21
2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	24
2.1.7 Investasi .....	25
2.1.8 Upah.....	27
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	30
2.2.1 Hubungan PDRB sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja .....	30
2.2.2 Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	30
2.2.3 Hubungan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	31

2.3 Penelitian Terdahulu .....	31
2.4 Kerangka Pemikiran .....	37
2.5 Hipotesis Penelitian.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	39
3.1.1 Jenis Data.....	39
3.1.2 Sumber Data .....	39
3.2 Metode Analisis Data .....	39
3.2.1 Metode Analisis Deskriptif.....	39
3.2.2 Metode Analisis Kuantitatif.....	40
3.3 Alat Analisis Data .....	40
3.3.1 Estimasi Model Data Panel.....	41
3.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	42
3.4 Pengujian Hipotesis .....	43
3.4.1 Uji F-statistik .....	43
3.4.2 Uji t.....	44
3.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	44
3.6 Uji Asumsi Klasik .....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Geografis di Pulau Sumatera .....	46
4.2 Kondisi Kependudukan di Pulau Sumatera.....	48
4.3 Kondisi Perekonomian di Pulau Sumatera.....	50
4.4 Kondisi Ketenagakerjaan di Pulau Sumatera .....	52
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Perkembangan PDRB sektor industri pengolahan, Investasi, Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera .....	55
5.1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan di Pulau Sumatera.....	55
5.1.2 Perkembangan Investasi di Pulau Sumatera .....	58
5.1.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera .....	62
5.1.4 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera.....	65

5.2 Pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan, Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera .....	67
5.2.1 Analisis Model Regresi Data Panel .....	67
5.2.2 Estimasi Model Data Panel.....	69
5.2.3 Uji Hipotesis .....	70
5.3 Analisis Ekonomi .....	74
5.3.1 Pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	74
5.3.2 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	75
5.3.3 Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	76
5.4 Implikasi Kebijakan .....	77
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
6.1 Kesimpulan.....	79
6.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Kondisi Ketenagakerjaan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 (Orang).....	4
Tabel 1. 2	Jumlah Tenaga Kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera (Orang).....	5
Tabel 4. 1	Jumlah Provinsi Serta Luas Wilayah di Pulau Sumatera tahun 2023.....	47
Tabel 4. 2	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Orang).....	49
Tabel 4. 3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Miliar Rupiah).....	51
Tabel 4. 4	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Orang).....	53
Tabel 5. 1	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Miliar Rupiah).....	56
Tabel 5. 2	Rata-Rata Perkembangan PDRB di Pulau Sumatera.....	57
Tabel 5. 3	Perkembangan Investasi Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera (Miliar Rupiah).....	59
Tabel 5. 4	Rata-Rata Perkembangan Investasi tahun 2017-2022.....	60
Tabel 5. 5	Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah).....	62
Tabel 5. 6	Rata-Rata Perkembangan Upah Minimum Provinsi.....	64
Tabel 5. 7	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera (Orang).....	65
Tabel 5. 8	Rata-rata Perkembangan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera.....	66
Tabel 5. 9	Hasil Uji Chow.....	68
Tabel 5. 10	Hasil Uji Hausman.....	68
Tabel 5. 11	Hasil Uji Langrange Multiplier.....	68
Tabel 5. 12	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Terbaik dengan Metode REM....	69
Tabel 5. 13	Hasil Uji F-statistik.....	70
Tabel 5. 14	Hasil Uji t-statistik.....	71
Tabel 5. 15	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	72
Tabel 5. 16	Individual Effect Masing-Masing Provinsi di Pulau Sumatera (Metode REM).....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Permintaan Tenaga Kerja.....	19
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Data Penelitian .....	86
Lampiran 2. 1 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM) .....	88
Lampiran 2. 2 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM) .....	89
Lampiran 2. 3 Hasil Regresi Random Effect Model.....	90
Lampiran 3. 1 Hasil Uji Chow .....	91
Lampiran 3. 2 Hasil Uji Hausman .....	92
Lampiran 3. 3 Hasil Uji Langrange Multiplier (LM).....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan. Pada umumnya, pembangunan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut sebagaimana tujuan dari pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tumangkeng, 2018).

Permasalahan yang paling sering di alami oleh negara berkembang yaitu sesuatu yang berhubungan erat dengan masalah ketenagakerjaan, dimana Indonesia termasuk ke dalam negara dengan pertumbuhan jumlah populasi yang cukup cepat yang artinya mempunyai input tenaga kerja yang cukup besar dan tentunya dapat memunculkan berbagai masalah ditandai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang sangat pesat (Purwasih & Soesatyo, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta orang. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 272,68 juta orang. Jumlah penduduk usia kerja (di atas 15 tahun) berjumlah 209,42 juta orang pada Agustus 2022. Jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 143,72 juta orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 68,63% dari jumlah penduduk usia kerja. Jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2021 jumlah angkatan kerja sudah bertambah 3,5 juta orang (2,55%), dan TPAK bertambah 0,83 poin persentase. Adanya peningkatan angkatan kerja yang tidak diikuti oleh peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerap angkatan kerja akan berdampak pada

peningkatan angka pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,86% (8,42 juta orang). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu menyerap tenaga kerja karena jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila sudah tersedianya lapangan pekerjaan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor perekonomian. Perluasan penyerapan tenaga kerja sangat diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dalam usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Hal ini harus bisa dilakukan agar terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas hidup yang layak dengan memperluas lapangan pekerjaan. Karena dengan meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatkan beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Pembangunan di Indonesia pada umumnya dititik beratkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan menempatkan sektor industri sebagai sektor pemimpin dan sebagai penyedia lapangan kerja bagi penduduk untuk memenuhi pasar kerja (Gulo et al., 2022). Berkembangnya sektor industri di Indonesia ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, PDB sektor industri pengolahan di Indonesia pada tahun 2017-2022 berkontribusi rata-rata sebesar 21,6% terhadap total PDB Indonesia. PDB sektor industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 kontribusi PDB di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,3%. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB berperan sebagai penyumbang terbesar bagi PDB dengan

sumbangan sebesar Rp.2.396.603,00 miliar di tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah berupaya dalam proses industrialisasi yang ditunjukkan dari kontribusi sektor industri yang dominan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Menurunnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri, dimana menurut Lewis perubahan struktur ekonomi dari agraris menjadi industri merupakan salah satu syarat dalam pembangunan ekonomi (Kurniawati et al., 2018). Sumbangan sektor industri yang paling dominan tersebut juga menunjukkan peran sektor industri sebagai *leading sector* yang dapat menggerakkan dan mengembangkan sektor-sektor lain untuk mempercepat pembangunan.

Peran sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting khususnya sektor industri pengolahan yang dianggap sebagai sektor unggulan dan industri yang strategis. Pembangunan sektor industri pengolahan (*manufacturing industry*) hampir selalu mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan negara-negara sedang berkembang. Sektor industri dijadikan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) yang berarti dengan adanya pembangunan industri akan memacu dan mengangkat sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa dan sektor pertanian (Purnawati & Khoirudin, 2019). Industri ini dipandang mampu mendorong perekonomian Indonesia yang sedang berkembang. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang melimpah, maka sektor industri pengolahan diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Produk industri mempunyai nilai jual yang tinggi dari pada sektor lain, hal ini dikarenakan produk industri sangat beragam dan memberikan nilai dan manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Akan tetapi semakin besar peranan suatu sektor, maka akan memunculkan suatu tantangan mulai dari aspek keterbatasan sumber daya terutama ketersediaannya tenaga ahli yang terampil, sarana dan prasarana, investasi yang perlu di tingkatkan, kondisi keamanan dalam negeri, serta pemerataan dalam perkembangan industri yang menjadi tantangan dalam negeri.

Pulau Sumatera adalah pulau kedua setelah Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu berjumlah 59.9 juta orang. Pulau Sumatera termasuk juga pulau yang memiliki jumlah angkatan kerja tinggi. Perluasan tenaga kerja di suatu wilayah diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang akan masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Berikut merupakan data yang memperlihatkan kondisi ketenagakerjaan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022.

**Tabel 1. 1 Kondisi Ketenagakerjaan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 (Orang)**

Tahun	Angkatan Kerja	Tenag kerja (Bekerja)	Pengangguran
2017	27.036.466	25.629.600	1.406.866
2018	28.628.334	27.166.672	1.461.662
2019	28.787.596	27.337.764	1.449.832
2020	29.476.031	27.665.526	1.810.505
2021	29.827.775	28.149.044	1.678.731
2022	30.486.119	28.849.415	1.636.704

*Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan tahun 2017-2022. Dapat dilihat bahwa angkatan kerja lebih tinggi daripada jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di Pulau Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan diikuti angka pengangguran yang menurun. Namun pada tahun 2020 jumlah angka pengangguran di Pulau Sumatera mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 24,88% atau sebesar 1.810.505 orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di tahun 2020 melambat karena adanya pandemi covid-19 sehingga banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan ketersediaan lapangan kerja turun signifikan. Jumlah tenaga kerja yang mengalami kenaikan setiap tahunnya yang diiringi turunnya angka pengangguran di Pulau Sumatera belum mampu dalam menyerap tenaga kerja karena rata-rata perkembangan pengangguran sebesar 3,64% masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata perkembangan tenaga kerja yang hanya 2,41%. Peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat akan mempengaruhi penambahan jumlah

angkatan kerja. Angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada, akan memperbesar jumlah pengangguran. Berikut terdapat data jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera tahun 2021 dan 2022.

**Tabel 1. 2 Jumlah Tenaga Kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera (Orang)**

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	146.960	174.649	185.183	194.928	197.345	175.231
Sumatera Utara	574.570	687.491	662.386	655.552	682.605	720.482
Sumatera Barat	199.994	210.052	232.639	244.086	231.074	230.775
Riau	198.468	217.092	231.736	230.213	257.595	230.084
Jambi	74.317	85.318	93.625	87.520	83.099	94.420
Sumatera Selatan	279.370	578.353	539.411	524.583	565.604	565.834
Bengkulu	48.474	52.647	57.322	55.954	58.588	53.218
Lampung	605.893	659.987	756.375	670.282	690.275	668.876
Kep. Bangka Belitung	42.623	47.834	54.396	57.293	53.363	50.185
Kep. Riau	191.572	232.552	246.487	231.405	271.944	297.852
<b>Pulau Sumatera</b>	<b>2.362.241</b>	<b>2.945.975</b>	<b>3.059.560</b>	<b>2.951.816</b>	<b>3.091.492</b>	<b>3.089.957</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja di Pulau Sumatera sebanyak 2.362.241 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja meningkat menjadi sebanyak 2.945.975 orang dengan peningkatan sebesar 24,71% dan pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja meningkat menjadi sebanyak 3.059.560 orang dengan peningkatan sebesar 3,86%. Namun pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja di Pulau Sumatera sebanyak 2.951.816 orang mengalami penurunan sebesar -3,52%. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,73% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.091.492 orang. Tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0,15% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.086.957. Apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja di provinsi-provinsi Pulau Sumatera tahun 2017-2022, jumlah tenaga kerja provinsi-provinsi di Pulau Sumatera cenderung mengalami penurunan dan hanya beberapa provinsi yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Adapun Provinsi Sumatera Utara

memiliki jumlah tenaga kerja yang tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 720.482 orang. Kemudian, jumlah tenaga kerja terendah yaitu Provinsi Kep. Bangka Belitung yang juga mengalami penurunan dari 53.363 orang menjadi 50.185 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera belum terealisasi dengan baik karena penduduk yang bekerja pada sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan.

Faktor- faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu PDRB, investasi, dan upah minimum provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto, 2014).

Sektor industri pengolahan khususnya di Pulau Sumatera merupakan salah satu sektor yang menjadi penyumbang kontribusi terbesar dalam perekonomian yang dapat dilihat dari Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera adalah sektor industri pengolahan. Perkembangan sektor industri pengolahan dinilai paling cepat dibandingkan dengan sektor lainnya. Bertambahnya jumlah industri pengolahan dapat membuka lapangan kerja baru yang menyebabkan meningkatnya pendapatan rumah tangga sehingga rumah tangga memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dengan adanya peningkatan jumlah industri pengolahan maka akan diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa PDRB sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan begitu juga secara provinsi. PDRB sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera pada tahun 2017 sebesar Rp.438.901,21 miliar, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar

Rp.457.783,45 miliar atau sebesar 4,30%, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.477.892,44 atau sebesar 4,39%, tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.479.137,57 miliar atau sebesar 0,26%, pada tahun 2021 sebesar Rp.496.415,81 miliar atau sebesar 3,61%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.514.089,93 atau sebesar 3,56%. PDRB sektor industri pengolahan tertinggi diperoleh oleh Provinsi Riau sebesar Rp.170.116,90 miliar. Sementara Provinsi Bengkulu memperoleh jumlah PDRB sektor industri pengolahan terendah di Pulau Sumatera dengan angka sebesar Rp.2.625,19 miliar. Namun, jika melihat dari sisi pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di setiap provinsi yang sudah mengalami kenaikan maka dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di setiap provinsi sudah berkembang baik dan berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan berbagai perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Hal ini terjadi karena dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan investasi juga menentukan perkembangan ekonomi daerah. Karena dengan adanya investasi juga dapat mendorong perkembangan teknologi dalam meningkatkan kesempatan kerja yang baru. Peningkatan kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri atau asing di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan kegiatan penanaman modal ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Awandari & Indrajaya, 2016). Semakin membaiknya investasi secara langsung memiliki dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, begitu pula pada tenaga kerja di Indonesia.

Investasi memiliki peran penting bagi setiap usaha untuk mengembangkan usahanya, karena investasi dapat memberi peluang bagi setiap pelaku ekonomi dalam memperluas usahanya serta memperbaiki sarana produksinya. Teori Keynes mengatakan bahwa cara mengurangi pengangguran yaitu dengan memperbanyak investasi. Misalnya alat-alat produksi seperti mesin akan membutuhkan operator dalam produksinya sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, besaran nilai investasi sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Investasi di Pulau Sumatera pada tahun 2017 sebesar Rp.53.997.399,6 miliar, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 44.760.119,5 miliar atau mengalami penurunan sebesar -17,1%, tetapi pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi sebesar Rp.50.433.525,6 miliar dengan peningkatan sebesar 12,67%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp.68.397.462,5 miliar dengan peningkatan sebesar 35,61%, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.51.865.545,3 miliar dengan penurunan sebesar -24,17% kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar Rp.79.432.770,2 dengan peningkatan sebesar 53,15%. Realisasi nilai investasi mengalami peningkatan karena investor masih percaya untuk menanamkan modal di Pulau Sumatera dan adanya peningkatan pelayanan sehingga menarik para investor. Adapun Provinsi dengan investasi tertinggi adalah provinsi Bengkulu sebesar 135,24% karena sumber daya alam yang melimpah dari sektor kelistrikan panas bumi dan adanya PLTU di Provinsi Bengkulu. Sedangkan provinsi dengan investasi terendah adalah Provinsi Sumatera Utara yang hanya sebesar -0,58% dikarenakan rendahnya efisiensi investasinya dan tingginya ICOR di Sumatera Utara sehingga para investor mengurungkan niatnya dalam berinvestasi. Investasi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dalam jangka panjang yang dapat meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Adapun investasi yang ada masih kurang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja karena para investor lebih tertarik berinvestasi yang bersifat padat modal atau teknologi dibandingkan padat karya.

Selain PDRB dan investasi, Upah Minimum Provinsi (UMP) juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Peningkatan UMP biasanya berdampak pada biaya produksi perusahaan yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja baru atau mempertahankan pekerja yang ada. Apabila nilai upah tinggi maka penawaran akan tenaga kerja semakin tinggi namun permintaannya akan menurun. Karena pengusaha yang tidak mampu membayar gaji yang tinggi sehingga memilih untuk mengurangi tenaga kerjanya. Apabila tingkat upah yang lebih rendah berarti lebih banyak tenaga kerja yang tersedia. Selama ini banyak terjadi masalah upah yang timbul karena perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Upah yang ditetapkan pada suatu wilayah akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain akan mempengaruhi tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan, maka akan semakin tinggi juga tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Adanya peningkatan upah dapat membuat biaya produksi juga meningkat, yang mengarah pada operasi perusahaan yang tidak efisien dan adanya kebijakan pengurangan pada tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan menaikkan upah minimum akan berdampak pada jumlah tenaga kerja menjadi berkurang dan dengan demikian mengurangi jumlah untuk menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa upah minimum provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari BPS, upah minimum provinsi terendah di Pulau Sumatera tahun 2022 adalah Provinsi Bengkulu sebesar Rp.2.238.094 sedangkan sembilan provinsi lainnya memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Upah minimum provinsi tertinggi berada pada Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp.3.264.884. Upah minimum provinsi yang meningkat

disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik. Melalui peningkatan upah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecenderungan penurunan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera dikarenakan dengan meningkatnya upah minimum maka produsen akan berusaha melakukan efisiensi untuk menutupi pembengkakan biaya produksi. Saat upah naik perusahaan kemungkinan besar akan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Menurut (Sulistiwati, 2012) kurangnya lapangan kerja disebabkan oleh kenaikan upah minimum sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap menurun. Penyerapan tenaga kerja perlu ditingkatkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat agar mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Penelitian mengenai pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja telah banyak dilakukan, namun penelitian ini masih penting dilakukan karena masih minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka pengangguran. Jika tingkat pengangguran meningkat akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tidak mendapat kehidupan layak yang akan memicu kepada kemiskinan. Peningkatan dan penurunan penyerapan tenaga kerja oleh sektor perekonomian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana perkembangan dan pengaruh penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera saat ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, investasi dan upah minimum provinsi di Pulau Sumatera”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan PDRB sektor industri pengolahan, investasi, upah dan penyerapan tenaga di Pulau Sumatera tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis perkembangan PDRB sektor industri pengolahan, investasi, upah dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022?
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022?

### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat akademis dan praktis. Adapun manfaat yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan dan sebagai bahan referensi serta acuan bagi peneliti selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah atau lembaga-lembaga yang lainnya dalam target dan kebijakan mengenai pemanfaatan ekonomi sumber daya manusia dalam mengembangkan pembangunan sektor industri terutama industri pengolahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Industri Pengolahan**

Menurut Undang-Undang Perindustrian (2014), industri merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dan memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri memiliki dua pengaruh dalam program pembangunan. Pertama, dalam model dua sektornya Lewis, produktivitas yang lebih besar dalam industri adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Kedua, industri pengolahan (*manufacturing*) memberikan peluang yang lebih besar bagi industri substitusi impor (ISI) untuk lebih efisien dan meningkatkan ekspor daripada hanya berfokus pada pasar primer.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa industri pengolahan merupakan kegiatan ekonomi mengubah suatu barang dasar menjadi mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi yang nilai gunanya lebih tinggi dan sifatnya mendekati penggunaan akhir. Industri pengolahan output yang diciptakan cenderung barang yang sifatnya siap dikonsumsi oleh konsumen. Kategori sektor industri pengolahan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi:

1. Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Migas
2. Industri Makanan dan Minuman
3. Industri Pengolahan Tembakau
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman.

8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional.
9. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik.
10. Industri Barang Galian Bukan Logam.
11. Industri Logam Dasar.
12. Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik.
13. Industri Mesin dan Perlengkapan.
14. Industri Alat Angkutan.
15. Industri Furnitur.
16. Industri Pengolahan Lainnya, jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Industri dapat digolongkan berdasarkan beberapa tinjauan. Untuk keperluan perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan, pemerintah membagi sektor pengolahan menjadi tiga sektor, yaitu:

1. Sub sektor industri pengolahan minyak non gas.
2. Sub sektor pengilangan minyak bumi.
3. Sub sektor pengolahan gas cair.

Jenis-Jenis Industri Pengolahan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Industri berdasarkan pengelompokan tenaga kerja
  - a. Industri Besar, industri yang menggunakan tenaga kerja sejumlah 100 orang atau lebih.
  - b. Industri Menengah, industri yang menggunakan tenaga kerja antara 20-99 orang.
  - c. Industri Kecil, industri yang menggunakan tenaga kerja 5-19 orang.
  - d. Industri Mikro/Rumah tangga, industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang.
2. Industri berdasarkan tempat bahan baku
  - a. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar.
  - b. Industri nonekstraktif adalah industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain selain alam sekitar.

- c. Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya.
- 3. Industri berdasarkan besar kecil modal
  - a. Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan menggunakan modal dalam jumlah besar untuk beroperasi dan membangun.
  - b. Industri padat karya adalah industri yang berfokus pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan dan pengoperasiannya.
- 4. Industri berdasarkan produktivitas perorangan
  - a. Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya tidak langsung diproses atau tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
  - b. Industri sekunder adalah industri bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali.
  - c. Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa.

### **2.1.2 Tenaga Kerja**

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja adalah setiap siapa saja yang dapat melakukan pekerjaan agar menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Biamrillah & Nurhayati (2018), tenaga kerja adalah penduduk yang dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau keseluruhan jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi suatu barang maupun jasa apabila ada permintaan terhadap tenaga mereka dan apabila mereka berkenan untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan masyarakat Indonesia. Tujuan penting dari pembangunan ialah kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Kelompok penduduk dalam usia kerja disebut tenaga kerja atau *manpower*. Dengan kata lain bahwa tenaga kerja adalah sebagai penduduk dalam usia kerja. BPS membagi tenaga kerja (*employed*) menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Tenaga kerja penuh (*Full Employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.
- 2) Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*Under Employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu.
- 3) Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*Unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam per minggu.

Klasifikasi Tenaga Kerja menurut Adianto & Fedryansyah (2018) adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Penduduknya

1) Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang pernah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah, mengajar dan mengurus rumah tangga. Secara umum pengertian dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya berbeda berdasarkan oleh batasan umur. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

- 2) Bukan tenaga kerja adalah penduduk yang belum cukup usia untuk bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para lansia (lanjut usia), anak-anak, para pensiunan.

b. Berdasarkan Batas Kerja

1) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang dimana mereka adalah orang-orang dalam usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan.

- 2) Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah orang-orang yang dalam usia nonproduktif yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah:

- a. Para pengangguran sukarela
- b. Para ibu rumah tangga dan orang cacat
- c. Anak sekolah dan mahasiswa berulang-ulang sehingga mereka mampu menguasai pekerjaan tersebut, seperti apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah orang-orang yang di dalam usia kerja dimana mereka sebagai pekerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: tukang sapu, tukang sampah, kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Masalah-masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi yaitu sebagai berikut:

1) Kualitas tenaga kerja yang rendah

Kurangnya penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan mempengaruhi daya saing produk dan jasa karena rendahnya kualitas dan kuantitas hasil produksi.

2) Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja

Setiap tahun jumlah angkatan kerja Indonesia terus meningkat sehingga hal ini akan menjadi beban bagi perekonomian karena meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak diimbangi oleh lapangan kerja yang banyak. Angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Setiap kegiatan ekonomi mempunyai daya serap tenaga kerja yang berbeda, baik dalam kuantitas maupun kualitas.

3) Persebaran tenaga kerja yang tidak merata

Karena pembangunan yang tidak merata di Indonesia sehingga persebaran tenaga kerja yang paling besar berada di Pulau Jawa karena Pulau Jawa pembangunannya paling maju dari daerah lain. Sehingga banyak masyarakat yang mencari pekerjaan di Pulau Jawa padahal daerah lain

masih membutuhkan tenaga kerja. Sehingga di Pulau Jawa akan banyak pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal dan membutuhkan tenaga kerja.

### **2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja**

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari banyaknya penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Jumlah penyerapan tenaga kerja ini bisa lebih kecil atau sama tergantung dari jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini dapat dikatakan apabila jumlah penyerapan tenaga kerja lebih kecil daripada kesempatan tenaga kerja maka akan terjadi pengangguran. Sebaliknya, jika jumlah kesempatan kerja sama dengan jumlah penyerapan tenaga kerja maka tidak akan terjadi pengangguran (Feriyanto, 2014). Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pemerintah setiap negara tidak terkecuali Indonesia juga melakukan reformasi terkait permasalahan tenaga kerja. Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang ada supaya pengangguran berkurang (Muslihatinningsih et al., 2020).

Daya serap tenaga kerja merupakan model permintaan suatu unit usaha akan tenaga kerja di pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah yang berlaku. Tingkat upah yang berlaku ini juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari pasar. Kekuatan terhadap permintaan tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal dari usaha tersebut. Sektor tradisional telah menjadi tempat bagi angkatan tenaga kerja dikarenakan sektor modern kurang mampu menyerap peningkatan kesempatan kerja. Lapangan kerja terbesar Indonesia berada pada sektor informal.

Hal ini karena sektor informal tidak membutuhkan banyak modal, kecerdasan atau keterampilan dan mudah diakses oleh pekerja.

#### **2.1.4 Permintaan Tenaga Kerja**

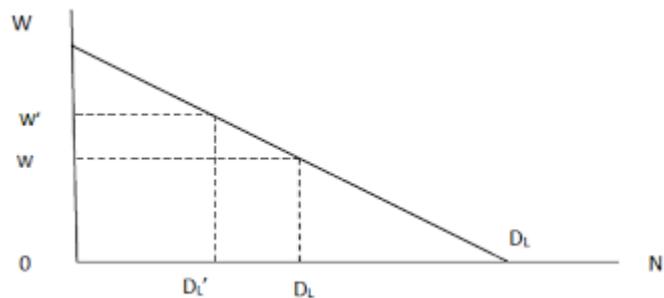
Teori permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang karena barang tersebut memberikan kegunaan kepada konsumen. Akan tetapi bagi pengusaha mempekerjakan seseorang bertujuan untuk membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Oleh karena itu, permintaan akan tenaga kerja merupakan permintaan turunan.

Teori ekonomi menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan turunan dari permintaan barang dan jasa. Dalam literatur ekonomi permintaan tenaga kerja diperlakukan sebagai model permintaan lainnya dengan ukuran tenaga kerja yang diminta sebagai variabel dependen dan satu set determinan penentu sebagai variabel independen (Ningrum, 2022).

Permintaan tenaga kerja dipelajari dengan memahami fungsi produksi perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa, yaitu seberapa banyak output yang dihasilkan menurut berbagai kombinasi tenaga kerja dan capital. Faktor penting lainnya yang berhubungan dengan fungsi produksi perusahaan adalah produk marginal tenaga kerja (MPE) yang didefinisikan sebagai output yang dihasilkan dari mempekerjakan tambahan tenaga kerja dengan input lainnya diasumsikan konstan.

Permintaan tenaga kerja yaitu sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu. Arti dari kata permintaan berbeda-beda menurut apa yang sedang dibicarakan. Apabila permintaan dibicarakan dari sudut pandang suatu komoditi, maka permintaan dapat dihubungkan antara harga dan kuantitas atau jumlah barang yang bersedia dibeli oleh para konsumen. Namun ketika membicarakan

permintaan dari segi ketenagakerjaan, maka permintaan dapat diartikan sebagai hubungan antara tingkat upah atau gaji (dari sudut pandang seorang majikan merupakan harga tenaga kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh seorang majikan untuk dipekerjakan (Ramdani et al., 2021). Kurva permintaan tenaga kerja sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Permintaan Tenaga Kerja**

Keterangan:

DL : Permintaan tenaga kerja (Demand of Labor)

W : Upah riil

N : Jumlah tenaga kerja

Kurva pada gambar 2.1 tersebut menjelaskan tentang permintaan tenaga kerja. Kurva permintaan tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara besarnya tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja adalah negatif, yang artinya semakin tinggi tingkat upah yang diminta maka akan mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta. Sebaliknya apabila tingkat upah yang diminta semakin rendah maka jumlah permintaan akan tenaga kerja akan meningkat.

Determinan permintaan tenaga kerja menurut Ramdani et al., (2021) dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor, yaitu :

1. Tingkat upah tenaga kerja

Jumlah optimal tenaga kerja yang dipergunakan dapat diperhitungkan dengan melihat tingkat upah. Semakin rendah tingkat upah, maka tenaga kerja yang diminta akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya apabila tingkat upah tinggi, tenaga kerja yang diminta akan semakin rendah.

2. Teknologi

Teknologi yang digunakan mempengaruhi kemampuan untuk menghasilkan. Ketika tingkat teknologi yang digunakan semakin efektif, berarti tenaga kerja dapat lebih megaktualisasikan kemampuan dan keterampilannya.

### 3. Produktivitas

Modal yang dipergunakan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi modal yang dimiliki dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

### 4. Kualitas tenaga kerja

Indeks kualitas tenaga kerja dapat diukur melalui latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya. Semakin tinggi pendidikan dan semakin berpengalaman tenaga kerja maka permintaan tenaga kerja pun akan semakin banyak.

### 5. Fasilitas modal

Suatu output dihasilkan dengan adanya modal dan tenaga kerja yang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan peranan faktor lain dapat menjadi faktor penentu lainnya.

Selain itu ada beberapa hal yang mempengaruhi perubahan permintaan tenaga kerja menurut Sumarsono (2003) dalam Ramdani et al., (2021) antara lain yaitu:

#### 1. Perubahan Tingkat Upah

Ketika tingkat upah berubah secara otomatis akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya biaya produksi suatu perusahaan.

#### 2. Perubahan Permintaan Pasar

Perubahan yang terjadi dalam permintaan pasar terhadap output yang dihasilkan oleh perusahaan tentunya dapat mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja. Ketika permintaan pasar terhadap output meningkat, maka perusahaan akan meningkatkan hasil produksinya, untuk meningkatkan hasil produksi, perusahaan akan menambah faktor produksi salah satunya adalah menambah tenaga kerja.

#### 3. Harga Barang Input menurun

Dengan turunnya harga barang yang digunakan sebagai input produksi akan menurunkan biaya produksi perusahaan. Hal tersebut menyebabkan harga jual

barang output akan semakin murah dan permintaan pasar semakin tinggi. Pada kondisi seperti ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya. Disamping perusahaan meningkatkan jumlah produksinya, permintaan akan tenaga kerja akan bertambah.

### **2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Pertumbuhan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

## Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi:

Menurut Yunianto (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara, yaitu:

1. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik, dan sumber daya manusia (*human resources*)
2. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah tenaga kerja (*labour force*) yang secara umum dianggap sebagai salah satu faktor positif yang merangsang pertumbuhan ekonomi
3. Kemajuan teknologi, merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: netral, hemat tenaga kerja (*labour saving*), dan hemat modal (*capital saving*).

### 2.1.5.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

#### 1. Teori David Ricardo

David Ricardo mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Jika suatu daerah memiliki banyak penduduk sehingga memiliki para pekerja yang banyak, maka upahnya menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika suatu daerah jumlah penduduknya yang sedikit sehingga sulit dalam mencari tenaga kerja membuat daerah itu menaikkan upah yang relatif tinggi. David Ricardo memikirkan pada hal pertumbuhan ekonomi yang sangat dikenal yaitu tentang *the law of diminishing return*. Pemikiran David Ricardo ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi penurunan produk marginal dikarenakan terbatasnya pada jumlah tanah. Menurut David Ricardo, peningkatan produktivitas pada tenaga kerja lebih membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang sangat cukup. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

#### 2. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar memandang pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh tingkat investasi, tabungan, dan produktivitas modal. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi dianggap terjadi apabila ada

peningkatan dalam investasi dan tabungan. Harrod Domar menyatakan jika perlu adanya pembentukan modal atau investasi agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau *steady growth*. Dalam teori ini terdapat syarat agar suatu perekonomian dalam negara bisa berkembang dalam jangka panjang. Pada teori pertumbuhan ekonomi ini pembentukan modal tidak dipandang sebagai suatu pengeluaran yang bisa meningkatkan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan teori ini, terdapat pengaruh positif antara kegiatan investasi dengan proses pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Teori ini juga menyatakan bahwa kegiatan investasi dianggap sebagai faktor penting yang memegang dua peran untuk mempengaruhi perekonomian.

Dua peran dan pengaruh tersebut ialah sebagai berikut:

1. Investasi mempunyai hubungan positif dengan pendapatan negara. Dengan demikian, semakin mudah proses investasi dalam negara, maka kegiatan investasi yang dilakukan bisa semakin banyak sehingga semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh oleh negara.
2. Investasi bisa memperbesar kapasitas produksi ekonomi melalui peningkatan stok modal. Pembentukan modal ini bisa dianggap sebagai suatu pengeluaran yang bisa menambah permintaan kebutuhan pada seluruh masyarakat.

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod Domar menekankan bahwa sangat penting untuk menyisihkan sebagian pendapatan yang didapatkan oleh negara untuk membiayai maupun memperbaiki barang-barang seperti bangunan, material, dan peralatan lain yang sudah rusak. Upaya perbaikan ini perlu dilakukan sebagai langkah untuk memajukan perekonomian negara. Dengan demikian investasi sangat diperlukan sebagai stok untuk menambah modal.

### **3. Teori Schumpeter**

Schumpeter menyatakan jika pertumbuhan ekonomi negara sangat ditentukan dari kemampuan kewirausahaan atau *entrepreneurship*. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha

yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

#### **2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB adalah kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu yang dapat menghasilkan suatu nilai bersih barang dan jasa akhir. PDRB dapat memperlihatkan kemampuan di suatu daerah untuk dapat mengelola berbagai macam sumber daya yang dimilikinya. Oleh sebab itu, tingginya PDRB yang dapat dihasilkan masing-masing daerah tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor yang menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Dalam perekonomian di suatu negara, tergantung sektor satu sama lain dan saling membutuhkan dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil jadinya (Windayana & Darsana, 2020). Bahan mentah dari berbagai sektor pertanian dan pertambangan diperlukan oleh sektor industri, dan juga sebaliknya hasil industri juga diperlukan oleh sektor pertanian dan jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik diartikan sebagai total nilai dari hasil seluruh unit usaha di dalam suatu wilayah atau yang merupakan total dari keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh dari semua unit di dalam suatu wilayah (Bustam, 2016). Harga yang berlaku mendefinisikan nilai tambah suatu barang dan jasa yang dapat dihitung menggunakan nominal harga di setiap tahun berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan menunjukkan suatu nilai barang dan jasa yang dapat dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu dimana sebagai dasar dalam perhitungan ini digunakan tahun 2010. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi dari kurun waktu tahun ke tahun hal ini berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto yang berdasarkan harga konstan (Matondang et al., 2019). Sedangkan dari BPS, produk Domestik Regional Bruto yaitu atas berdasarkan harga yang berlaku digunakan sebagai petunjuk besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Menurut Rosadi (2022), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu dan dinyatakan dalam satu tahun. Ada dua macam Produk Domestik Regional Bruto, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar/Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian berdasarkan harga yang berlaku di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga sewa tanah, dan keuntungan, penyusutan dan pajak tidak langsung neto). Menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya, akan menghasilkan produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar/berlaku.

2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan pengertiannya sama dengan PDRB atas dasar harga berlaku, hanya saja harga konstan adalah harga tetap tahun tertentu yang tidak akan berubah meskipun asumsi-asumsi yang lain berubah.

### **2.1.7 Investasi**

Investasi adalah sejumlah dana yang dikeluarkan atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi akan mendorong terjadinya akumulasi modal, penambahan stok bangunan gedung dan peralatan lainnya, meningkatkan potensi produksi daerah dan mempercepat kemajuan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peran investasi sangat penting dalam konteks ekonomi makro agar perekonomian negara dapat berkembang dan berjalan dengan baik sehingga mengurangi kemiskinan dan pengangguran di setiap provinsi (Bayu et al., 2019). Dengan kegiatan investasi ini masyarakat dapat terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi atau penanaman modal selanjutnya memiliki dua status. Pertama, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merupakan penanaman modal yang dilakukan dalam rangka membangun usaha di dalam negara, dalam hal ini di Indonesia, baik berupa badan usaha berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, maupun usaha perseorangan. Kedua, Penanaman Modal Asing (PMA) yang merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemodal asing baik itu sepenuhnya maupun adanya perkongsian dengan pemodal dalam negeri. Terkait dengan jenisnya, modal asing ini dapat berupa modal swasta maupun modal negara. Adapun modal asing swasta digolongkan menjadi investasi dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN adalah sebuah bentuk entitas bisnis yang paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Selain itu, PMDN dianggap memiliki dasar hukum yang paling jelas dan menjadi pilihan utama bagi para investor asing yang ingin mengembangkan bisnis tertutup terhadap kepemilikan asing.

Investasi langsung merupakan investasi di mana perusahaan asing melakukan pengawasan atas penanaman aset di negara pengimpor modal berdasarkan pengakuan hukum dari negara pengimpor modal tersebut yang caranya dilakukan melalui investasi itu. Investasi langsung ini dapat berupa dibentuknya suatu cabang perusahaan atau bahkan perusahaan oleh pemilik saham mayoritas di negara pengimpor modal, membangun korporasi di negara asal penanam modal agar dapat beroperasi secara khusus di negara lain, atau peletakan aset tetap oleh perusahaan nasional negara asal penanam modal di negara lain. Sedangkan investasi tidak langsung merupakan investasi dalam bentuk penguasaan saham atau obligasi yang dapat dipindahkan oleh warga dari beberapa

negara lain akan tetapi tidak memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan. Hak yang dimiliki hanya berupa hak atas pembagian dividen saja.

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera dengan perekonomian yang ada saat ini, salah satu caranya yaitu dengan investasi (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun investor asing. Menurut teori keynes menjelaskan bahwa investasi memiliki hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja. Apabila semakin tinggi tingkat investasi maka semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja. Semakin rendah tingkat investasi maka semakin rendah juga penyerapan tenaga kerja. Dalam analisisnya, Keynes menunjukkan dua faktor penting yang menentukan investasi yaitu suku bunga dan ekspektasi masa depan mengenai keadaan kegiatan ekonomi.

### **2.1.8 Upah**

Salah satu faktor produksi yang berpengaruh dalam kegiatan produksi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dapat membantu dalam proses produksi sehingga menghasilkan output yang diinginkan perusahaan. Adanya pengorbanan yang dikeluarkan tenaga kerja untuk perusahaan maka tenaga kerja berhak atas balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut berupa upah.

Upah minimum yaitu upah yang merupakan suatu standar minimum dalam pemberian upah yang bisa digunakan untuk pelaku usaha, pemilik modal dan pelaku industri, untuk memberikan gaji atau upah yang berada di dalam perusahaannya (Rusniati et al., 2018). Tujuan adanya penetapan upah minimum kabupaten atau kota agar para pekerja dapat menghasilkan penghasilan yang layak untuk mereka yang merupakan sebagai balas jasa untuk tenaga yang diberikan oleh tenaga kerja terhadap pihak perusahaan yang telah menggunakan jasa mereka (Kawet et al., 2019).

Upah yang diterapkan pemerintah daerah berpengaruh pada permintaan pasar kerja. Dari perubahan tersebut mempunyai dampak kepada tenaga kerja pada sektor tertentu ke dalam sektor yang lainnya. Sektor industri pengolahan menjadi penopang dalam pengembangan industri suatu negara. Agar dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan sektor industri yang dijadikan sektor pemimpin, tetapi bisa diperoleh oleh semua lapisan masyarakat. Sektor industri pengolahan merupakan media yang dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang melimpah, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi (Warapsari et al., 2020). Menurut Todaro dalam (Hidayah et al., 2016) bahwa semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Menurut Sukirno (2013) upah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Upah nominal (upah uang) adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
- 2) Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Peraturan pemerintah No.36 Tahun 2021).

Setiap provinsi di Indonesia menetapkan upah minimum yang berbeda-beda. Menurut (Nurtyas, 2016), Penetapan upah minimum didasarkan pada standar biaya hidup. Namun, tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa masih rata-rata dibawah standar hidup layak pekerja. Pemerintah menetapkan UMP berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan digunakan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi KHL dianggap kurang ketika digunakan untuk menetapkan nilai UMP, sehingga perlu digunakan faktor lain

yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah indeks perubahan biaya hidup. Dengan digunakannya IHK, maka pemerintah dapat mengetahui harga-harga saat ini, sehingga tingkat upah dapat disesuaikan dengan harga yang sedang terjadi. Selain menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga digunakan untuk menetapkan nilai UMP. TPAK ini dapat digunakan untuk mengetahui penawaran tenaga kerja, sehingga dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja tersebut, maka dapat disesuaikan dengan upah yang layak diterima oleh para pekerja karena biasanya upah dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja.

Dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi yang baru, nilai tambah yang dihasilkan oleh pekerja juga diperhitungkan. Teori upah efisiensi menyebutkan, dalam penetapan upah minimum yang tinggi memungkinkan tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitasnya dalam jangka yang panjang. Kenaikan upah juga memungkinkan para pekerja untuk memberi nutrisi yang baik untuk anaknya, sehingga akan memberi dampak yang besar dalam peningkatan produktivitasnya. Menurut teori ini, upah yang dibayarkan lebih tinggi daripada upah keseimbangan, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat, dan jumlah output yang dihasilkan akan meningkat.

Dengan penetapan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menyesuaikan antara tingkat upah dengan pekerjaan yang dilakukan. Namun menurut teori klasik penetapan upah minimum (UMP) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi UMP maka akan semakin rendah penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi karena tingginya penetapan UMP akan mengakibatkan semakin besar pengeluaran perusahaan untuk membayarkan upah kepada tenaga kerja, semakin besar upah yang dibayarkan maka biasanya akan terjadi kenaikan harga output produksi perusahaan tersebut. Jika harga output produksi meningkat maka daya beli konsumen akan turun dan menyebabkan keuntungan/ laba yang diperoleh perusahaan rendah. Untuk mencegah hal itu terjadi maka perusahaan melakukan PHK terhadap beberapa pekerjanya. Pemecatan/PHK yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan PDRB sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja**

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang akan menambah nilai tambah dalam mendapat profit. Penggolongan perusahaan industri didasarkan oleh banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut tanpa memperhatikan penggunaan mesin dan besarnya modal yang dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan suatu produk. Sehingga PDRB sektor industri pengolahan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi karena meningkatnya PDRB menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah produksi atau penjualan suatu unit ekonomi di wilayah tersebut sehingga semakin banyak industri yang akan diproduksi akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak (Widyaningrum & Bintariningtyas, 2021).

### **2.2.2 Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Investasi memiliki tujuan untuk mengembangkan produktivitas yang berdampak pada surplus menjadi lebih besar yang akan mempengaruhi proses investasi pada sektor tertentu. Hal ini berpengaruh pada kesempatan kerja yang akan meningkat sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Karib MS, 2012). Sementara itu, investasi yang diberikan untuk penyediaan barang modal seperti perlengkapan produksi dan mesin yang meningkatkan hasil output akan menambah penyerapan tenaga kerja dikarenakan barang-barang modal tersebut memerlukan tenaga manusia untuk menjalankannya.

Investasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, apabila tingkat investasi semakin tinggi maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan serta tingkat penyerapan tenaga kerja. Besarnya dari tingkat investasi akan mempengaruhi tingkat permintaan tenaga kerja dimana akan semakin tinggi tingkat produksi yang akan dihasilkan. Dengan kata lain adanya investasi maka akan mendorong bertambahnya barang modal dimana akan menyerap faktor produksi baru yaitu tingkat lapangan kerja akan bertambah serta kesempatan kerja akan meningkat dan mengurangi tingkat pengangguran.

### **2.2.3 Hubungan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja. Antara upah dan jumlah penyerapan tenaga kerja terdapat hubungan yang berbanding terbalik. Hal ini sesuai dengan teori Sumarsono (2003) dalam (Citamaha & Pudjihardjo, 2020) yang mengemukakan bahwa upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi yang selanjutnya akan mengakibatkan pengurangan atau penambahan jumlah penyerapan tenaga kerja. Ketika upah naik maka produsen akan cenderung menurunkan jumlah tenaga kerja karena sifat dasar yang selalu ingin memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, ketika upah turun maka produsen tidak akan keberatan dalam menambah jumlah tenaga kerja yang akan digunakan sehingga penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan.

Upah yang tinggi akan menyebabkan turunnya penyerapan tenaga kerja dan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Jika upah yang rendah akan menyebabkan peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja. Upah yang tinggi kemudian mengindikasikan biaya produksi yang tinggi pula. Dengan begitu, perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap menurunnya penyerapan tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Nurfiat & Rustariyuni, 2018).

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Chusna (2013) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah tahun 1980-2011”. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan uji secara bersama-sama menunjukkan bahwa pertumbuhan

sektor industri, investasi dan upah secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah.

Rochmani & dkk, (2016) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Tengah”. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder mengenai pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kabupaten/kota (UMK) dan jumlah unit usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kabupaten/kota dan jumlah unit usaha industri berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Secara parsial laju pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, sedangkan jumlah unit usaha industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Purwasih & Soesatyo (2017) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan sektor industri dari tahun 2009- 2015 di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan dan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri juga terus mengalami peningkatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan tanda positif yang artinya ketika pertumbuhan sektor industri meningkat, maka penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan.

Penangsang (2017) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri Kecil, Investasi Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya Tahun 2005-2012”. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa *time series*. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Model regresi yang digunakan yaitu metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel laju pertumbuhan sektor industri kecil tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya. Variabel investasi dan variabel upah berpengaruh positif

terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya. Sehingga apabila upah naik maka penyerapan tenaga kerja sektor industri juga ikut meningkat. Berdasarkan uji secara simultan atau bersama-sama variabel independen yaitu laju pertumbuhan sektor industri kecil, investasi dan upah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil di kota Surabaya.

Soelistyo (2018) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Upah, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Ex post facto. Penelitian Ex post facto adalah model penelitian tentang variabel yang kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan Arikunto, (2010). Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data panel. Data panel yaitu model ekonometri yang menyatukan antara deret waktu(*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

Sitompul & Simangunsong (2019) melakukan penelitian dengan judul “The analysis of the impact of GDP, FDI, Minimum Wage on Employment in Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Hasil variabel FDI dan Upah minimum tidak mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja, maka setiap kenaikan yang terjadi GDP sebesar 1%, kesempatan kerja akan meningkat sebesar 0,09%. Variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil pengujian variabel investasi adalah investasi FDI yang tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Nurman & Sentosa (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Sektor Industri Tingkat Pendidikan Dan Investasi Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Indonesia”. Metode Penelitian yang dipakai yaitu: *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil estimasi memperlihatkan bahwa upah sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga

kerja sektor industri, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia, investasi asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia, Secara bersama-sama upah sektor industri, tingkat pendidikan dan investasi asing berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia.

Maulana et al., (2020) Maulana et al., (2020) melakukan penelitian dengan judul “*Analysis of Investment, Wage Levels, The Number of Industries on Employment in The Industrial Sector in Regencies/Cities in East Java Province*”. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dilanjutkan dengan pengujian hipotesis t-test. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, tingkat upah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, dan jumlah industri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri.

Pramusinto & Daerobi (2020) melakukan penelitian dengan judul “*Labor Absorption of the Manufacturing Industry Sector in Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Ditemukan bahwa variabel upah, jumlah perusahaan industri, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai investasi, teknologi, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara parsial variabel upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Jumlah perusahaan industri, produk domestik bruto regional, dan variabel teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadapnya. Sedangkan variabel nilai investasi dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Jaya & Kholilah (2020) melakukan penelitian dengan judul “*Effect of gross domestic regional bruto, provincial minimum wage, and investment on labor absorption*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis data panel dengan bantuan eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berbeda dengan kedua variabel tersebut, UMP berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini penting untuk pengambilan kebijakan tentang permasalahan tenaga kerja di Indonesia.

Melansena et al., (2021) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri Di Sulawesi Utara”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Model regresi yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laju pertumbuhan sektor industri berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Sehingga ketika laju pertumbuhan sektor industri naik maka akan diikuti dengan penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Sulawesi Utara. Investasi tidak signifikan namun berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Tinggi rendahnya investasi mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Dan upah berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Kemudian secara simultan laju pertumbuhan sektor industri, investasi, dan upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara.

Fadillah & Priana (2022) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah industri kecil, upah minimum Provinsi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di provinsi Jawa Barat tahun 2011 –2020. Pada penelitian metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistics 25. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel jumlah industri kecil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel upah minimum Provinsi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi juga tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tuban.

Renaldi & Nurfahmiyati (2022) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumbar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010-2020. Alat analisis penelitian menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menjelaskan 95,28 persen penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat sebagian besar dipengaruhi oleh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sedangkan sisanya 4,72 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian seperti rasio ketergantungan, atau variabel dummy seperti variabel karakter serta budaya, dan lain sebagainya.

Utomo (2022) dengan penelitian yang berjudul “*The Factors of Affecting Labor Absorption in Java Island*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2019. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yang terdiri dari enam provinsi di Pulau Jawa periode 2010-2019. Pengujian dalam penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda dengan alat analisis menggunakan Eviews 9. Berdasarkan hasil tersebut maka IPM dan PDRB berpengaruh signifikan. Sedangkan upah minimum dan tingkat pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.

Haedzar P et al., (2022) melakukan penelitian dengan judul “*Labour Absorption in the Manufacturing Industry Sector in Central Java Province Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan Metode Regresi Berganda Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan adalah data cross sectional untuk setiap indikator di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Investasi, Nilai Produksi dan Jumlah Perusahaan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah. PDRB Kabupaten/Kota dan UMK menunjukkan hasil yang bertentangan dengan teori dan tidak signifikan.

Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini menggunakan periode pengamatan menjadi 2017-2022. Kedua, penelitian ini menambahkan variabel PDRB sektor industri pengolahan dan investasi sebagai variabel independen. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel karena data yang digunakan merupakan data gabungan antara data time series dan data cross section. Penelitian ini menganalisis provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

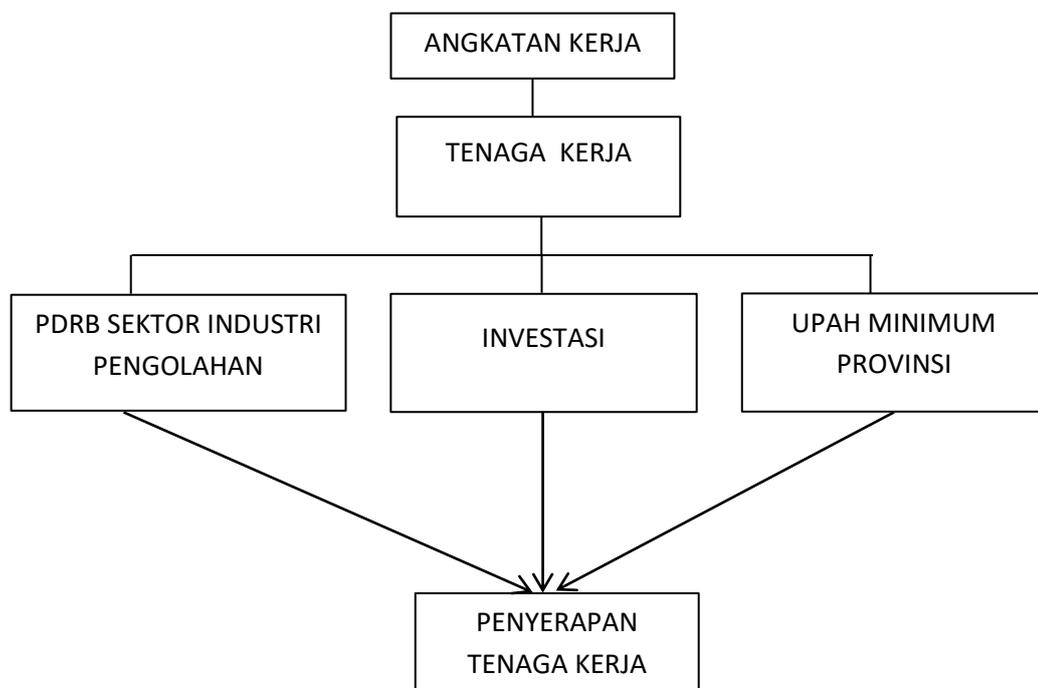
Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk akan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja terdiri dari tenaga kerja yang bekerja pada setiap kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dikatakan sudah baik atau belum dapat diketahui melalui penyerapan tenaga kerja. Jika suatu wilayah itu dapat menyerap penduduknya untuk bekerja dan selalu bertambah penyerapannya, maka dari hal itu menggambarkan ekonomi di wilayah tersebut sudah memiliki kinerja yang baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat pertumbuhan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja yang dapat diketahui dari jumlah PDRB suatu wilayah. Setiap sektor di suatu wilayah memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang berbeda. Sehingga, bila tingkat pertumbuhan sektor semakin tinggi, maka pertumbuhan kesempatan kerja pada sektor tersebut juga akan semakin tinggi.

Investasi atau penanaman modal disebut juga sebagai jumlah yang dikeluarkan oleh orang yang menanamkan modalnya dalam keperluan perusahaan berupa berbagai barang modal dan perlengkapan produksi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Investasi berhubungan positif dengan penyerapan tenaga kerja. Besarnya serapan tenaga kerja pada sektor industri dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat investasi

pada sektor industri. Semakin besarnya investasi juga dapat meningkatkan pendapatan di suatu daerah. Jika kegiatan investasi ini tepat sasaran dilakukan maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peluang kesempatan kerja yang bertambah. Dengan terbukanya peluang kesempatan kerja maka akan memudahkan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap.

Keberhasilan meningkatnya penyerapan tenaga kerja itu sendiri di pengaruhi oleh faktor upah. Tingginya tingkat upah yang diterima oleh pekerja akan meningkatkan produktivitas kerja. Para pekerja menerima upah yang diterima sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.



**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran**

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa PDRB sektor industri pengolahan, investasi, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan data gabungan antara data deret waktu (*time series*) dan data *cross section*. Data deret waktu dalam penelitian ini yaitu periode tahun 2017-2021, dan data *cross section* yang digunakan yaitu data dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera.
2. Nilai investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera.
3. Upah minimum provinsi di Pulau Sumatera.
4. Penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera.

##### **3.1.2 Sumber Data**

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) yang diakses melalui website : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), situs resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yaitu *National Single Window for investment* ([nswi.bkpm.go.id](http://nswi.bkpm.go.id)) serta diperoleh melalui berbagai web internet ataupun buku-buku sesuai dengan ketersediaan data.

#### **3.2 Metode Analisis Data**

##### **3.2.1 Metode Analisis Deskriptif**

Metode ini disebut sebagai penelitian yang dilakukan dengan upaya berupa penentuan pemecahan masalah yang ada dengan berdasar pada data-data yang kemudian disajikan, dianalisis dan diinterpretasikan. Penelitian ini berisikan fakta-fakta yang sebagaimana adanya.

### 3.2.2 Metode Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan analisis yang menyajikan informasi dalam bentuk bilangan atau angka yang dimulai dari metode pengumpulan data, menginterpretasikan hasil data, dan mengungkapkannya secara berupa angka atau dalam bentuk informasi atau deskripsi yang menampilkan hasil data yang diolah.

### 3.3 Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang perkembangan PDRB sektor industri pengolahan, investasi, upah dan penyerapan tenaga kerjadi Pulau Sumatera tahun 2017-2022, maka digunakan rumus sebagai berikut.

$$\Delta X_n = \frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana :

$\Delta X_n$  = Persentase perkembangan variabel pada tahun n

$X_n$  = Data tahun sekarang

$X_{n-1}$  = Data tahun sebelumnya

2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera. Analisis regresi data panel menggunakan bantuan program *EViews 12*. Adapun model umum regresi data panel dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Kemudian dari persamaan di atas maka dapat di transformasikan ke dalam model ekonometrika yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 INV_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

$\beta_0$  = Intersep

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien

$\varepsilon$  = error term/derajat kesalahan model

i = data cross section, yaitu 10 Provinsi di Pulau Sumatera

- t = tahun penelitian, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022  
PTK = Penyerapan tenaga kerja sebagai variabel y  
PDRB = Produk domestik regional bruto sektor industri sebagai variabel  $X_1$   
INV = Investasi sebagai variabel  $X_2$   
UMP = Upah minimum provinsi sebagai variabel  $X_3$

### 3.3.1 Estimasi Model Data Panel

#### a. Common Effect Model

Model common effect merupakan model regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yang dengan hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperlukan melihat perbedaan waktu dan individu dalam menggabungkan data sehingga pendekatan yang digunakan yaitu metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model yang memiliki asumsi intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Hal ini dikarenakan dasar penggunaan dalam regresi data panel ini mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya.

#### b. Fixed Effect Model

Pada model common effects mengasumsikan bahwa intersep setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah sama. Teknik yang digunakan dalam mengestimasi data panel yaitu dengan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan yang ada pada intersep antar individu. Namun asumsi ini memungkinkan bahwa hasil regresi akan jauh berbeda dan hasil estimasi bisa tidak valid. Adanya berbagai faktor yang tidak semuanya masuk ke dalam persamaan dan perbedaan unit observasi memungkinkan intersep yang berbeda begitu juga dengan koefisien regresi atau slopenya. Maka dari itu selanjutnya terjadi pembentukan model fixed effects. Efek tetap dimaksudkan bahwa satu objek observasi memiliki konstanta yang tetap untuk beberapa periode waktu. demikian juga koefisien regresinya akan tetap dari waktu ke waktu.

Model fixed effect menangkap individual heterogeneity kedalam intersept. Teknik estimasi ini menggunakan variabel dummy dalam menangkap adanya

perbedaan intersept. Fixed effect mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) bernilai tetap antar individu dan antar waktu.

Menambahkan variabel dummy dapat relatif mudah, akan tetapi hasil evaluasi relatif kompleks ketika menggunakan jumlah cross section yang banyak. Seringkali terjadi masalah heteroskedastisitas yang mengakibatkan terjadinya bias data pada data panel. Metode kuadrat terkecil umum adalah teknik yang populer untuk memecahkan masalah ini.

#### c. Random Effect Model

Di dalam estimasi data panel dengan model fixed effects melalui teknik Least Square Dummy Variabel (LSDV) menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Maka untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variabel residual yang dikenal sebagai model Random Effects. Pada model ini akan dipilih estimasi data panel dimana error mungkin saling berhubungan koefisien regresi dan konstanta. Maka dari itu, pada model ini diasumsikan bahwa ada perbedaan intersep untuk setiap individu dan intersep tersebut disebabkan oleh residual/error dan secara variabel random atau stakastik. Sehingga dalam model ini terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh, yang merupakan kombinasi time series dan cross section, dan residual secara individu yang merupakan karakteristik random dari observasi unit ke-i dan tetap sepanjang waktu.

Metode REM merupakan metode dengan menggunakan metode error agar dapat menentukan hubungan antara penampang dan deret waktu. Model ini digunakan untuk menguji individu dan perubahan dari waktu ke waktu. Ketika model efek tetap digunakan, derajat kebebasan berkurang karena penggunaan tambahan dummy, dan efisiensi parameter yang diestimasi menurun, sehingga dapat dikatakan bahwa efek acak meningkatkan efek tetap.

### 3.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menemukan model terbaik yang akan digunakan dalam analisis regresi data panel maka dilakukan perbandingan antara ketiga model dengan menggunakan beberapa tes, sebagai berikut :

#### 1. Uji Chow

Digunakan dalam memilih metode paling tepat diantara FEM (Fixed Effect Model) dengan CEM (Common Effect Model). Bandingkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan DW-Statistics. Setelah menerima hasil, nilai tertinggi dari kedua tes menunjukkan apakah PLS atau FEM adalah metode terbaik.

## 2. Uji Hausman

Hausman test merupakan pengujian statistic untuk memilih apakah Metode Fixed Effect model (FEM) atau random effect model (REM) yang paling tepat digunakan. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistic chi-kuadrat dimana  $df$  adalah  $k$ . Dimana  $k$  adalah jumlah variabel bebas. Jika statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis, maka model yang benar adalah model efek tetap (FEM) dan sebaliknya.

## 3. Uji Langrange Multipler

Uji LM merupakan pengujian untuk memilih apakah model Common Effect lebih baik daripada model Random Effect, maka digunakan uji Lagrange Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan.

### 3.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.4.1 Uji F-statistik

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Pada hipotesis yang akan dilakukan pengujian didalam penelitian ini yaitu  $H_0$  : variabel independen (bebas) tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat dan  $H_1$  : variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (terikat).

Dalam penelitian dilakukan uji ini dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dan itu artinya variabel independent secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependent (terikat). Begitu pula jika seandainya F-hitung lebih kecil dari F-tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Kemudian, bisa dilihat dengan nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi

kurang dari 0,05 (tingkat signifikansi 5%), variabel independen dengan cara bersamaan memberi pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh kepada variabel dependen secara bersamaan.

### **3.4.2 Uji t**

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji-t akan menunjukkan apakah variabel bebas (lambat) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (batas). Dilihat dari perbandingan nilai probabilitas variabel terikat signifikansi  $\alpha$  yang diberikan. Jika nilai probabilitas t-hitung lebih besar daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  yang selesai ditentukan, maka  $H_0$  diterima, selanjutnya apabila probabilitas nilai t-hitung lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  yang sudah ditentukan, maka  $H_1$  diterima.

### **3.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model menjelaskan variabel terikat yang dihitung. Tidak hanya itu, koefisien determinasi juga memudahkan peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Apabila angka pada koefisien determinasi  $R^2$  mendekati nol = 0, artinya tidak memiliki pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Demikian pula nilai koefisien determinasi  $R^2$  yang mendekati 1 berarti variabel bebas memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) memiliki sifat yang dapat dilihat ketika nilai  $0 \leq R^2 \leq 1$ .

### **3.6 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk memverifikasi kecocokan model regresi yang digunakan dalam penelitian sebagai alat analisis. Pada regresi data panel, uji asumsi klasik meliputi linieritas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Menurut Gujarati & Porter (2009), tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan secara wajib untuk setiap regresi linear

yang menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Pada model terpilih yaitu random effect model menggunakan metode generalized least square (GLS). Salah satu kelebihan metode GLS yaitu tidak perlu memenuhi asumsi klasik. Jadi, apabila model regresi menggunakan random effect model maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila digunakan model regresi common effect model atau fixed effect model maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Menurut Gujarati dan Porter (2009) sangat kecil kemungkinan terjadi multikolinieritas pada data panel sehingga peneliti cukup melakukan uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

### **3.7 Operasional Variabel**

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam memudahkan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja yang bekerja atau dipekerjakan oleh perusahaan di dalam sektor industri pengolahan. Sumber data didapatkan pada Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan tahun 2017-2022 yang dinyatakan dalam satuan orang.
2. PDRB sektor industri pengolahan adalah suatu perubahan nilai PDRB yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera atas dasar harga konstan 2010 yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Data yang digunakan tahun 2017-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
3. Investasi adalah suatu pengeluaran sejumlah dana oleh investor untuk membiayai kegiatan produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Data diambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dari tahun 2017-2022 dengan satuan yang dinyatakan dalam miliar rupiah.
4. Upah adalah upah minimum provinsi yang berlaku dan ditetapkan di Pulau Sumatera yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah. Data yang digunakan tahun 2017-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Geografis di Pulau Sumatera**

Pulau Sumatera adalah sebuah pulau yang menempati posisi keenam sebagai pulau terbesar di dunia dan terbesar ketiga di Indonesia, dengan luas pulau 473.481 km persegi. Pulau Sumatera terletak di ujung barat Indonesia. Pulau Sumatera juga memiliki sebutan lain dalam bahasa Sanskerta yaitu “Suwarnabhumi” dengan arti Pulau Emas. Secara geografis, Pulau Sumatera berada di posisi  $6^{\circ}$  LU –  $6^{\circ}$  LS dan antara  $95^{\circ}$  BT –  $105^{\circ}$  BT. Batas daratan Pulau Sumatera di sebelah utara Pulau Sumatera berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah timur Pulau Sumatera berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan Pulau Sumatera berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah barat Pulau Sumatera berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur pulau, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar, antara lain; Asahan (Sumatera Utara), Kampar, Siak dan Sungai Indragiri (Riau), Batang Hari (Sumatera Barat, Jambi), Ketahun (Bengkulu), Musi, Ogan, Lematang, Komering (Sumatera Selatan), dan Way Sekampung (Lampung). BPS, (2022). Secara geografis, Pulau Sumatera dikenal sebagai kawasan *ring of fire* karena wilayahnya banyak jajaran gunung api.

Di bagian barat pulau, terbentang Pegunungan Barisan yang membujur dari utara hingga selatan. Hanya sedikit wilayah dari pulau ini yang cocok digunakan untuk pertanian padi. Sepanjang bukit barisan terdapat gunung-gunung berapi yang hingga saat ini masih aktif, seperti Merapi (Sumatera Barat), Bukit Kaba (Bengkulu), dan Kerinci (Jambi). Pulau Sumatera juga banyak memiliki danau besar, di antaranya Laut Tawar (Aceh), Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas, dan Danau Dibawah (Sumatera Barat), dan Danau Ranau (Lampung dan Bengkulu).

Sejak berlakunya UU Otonomi Daerah, Pulau Sumatera secara administrative terbagi menjadi 10 provinsi yang sebelumnya ada 8 provinsi dan penambahan 2 provinsi ini yaitu Provinsi Bangka Belitung yang dimekarkan dari

Provinsi Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi provinsi ke-29 di Indonesia pada tanggal 4 Desember 2000 serta Provinsi Kepulauan Riau yang dimekarkan dari Provinsi Riau dan menjadi provinsi ke-32 pada tanggal 25 Oktober 2002. Wilayah Sumatera terdiri dari 5.277 pulau dimana 2.654 pulau diantaranya sudah bernama dan 2.623 pulau lainnya belum bernama. Pulau Sumatera sendiri memiliki 34 kota, 117 kabupaten, 1.774 kecamatan, dan 23.213 kelurahan/desa.

**Tabel 4.1 Jumlah Provinsi Serta Luas Wilayah di Pulau Sumatera tahun 2023**

Provinsi	Ibukota Provinsi	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1. Aceh	Banda Aceh	58.375,63
2. Sumatera Utara	Medan	72.891,23
3. Sumatera Barat	Padang	42.012,89
4. Riau	Pekanbaru	87.023,66
5. Jambi	Jambi	50.058,16
6. Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43
7. Bengkulu	Bengkulu	19.919,33
8. Lampung	Bandar Lampung	34.623,80
9. Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.424,06
10. Kep. Riau	Tanjung Pinang	8.201,72
<b>Pulau Sumatera</b>		<b>480.793,28</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.1, Pulau Sumatera memiliki luas wilayah 480.793,28 km<sup>2</sup> atau sekitar 25,6% dari total luas wilayah di Indonesia. Provinsi yang terluas di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 91.592,43 km<sup>2</sup> atau 4,79% dari luas wilayah Indonesia, dilanjutkan dengan Provinsi Riau yang mempunyai luas wilayah 87.023,66 km<sup>2</sup> atau 4,55% dari luas wilayah Indonesia, lalu Provinsi Sumatera Utara yang luas wilayahnya 72.981,23 km<sup>2</sup>, Provinsi Aceh 57.956,00 km<sup>2</sup>, Provinsi Jambi 50.058,16 km<sup>2</sup>, Provinsi Sumatera Barat 42.012,89 km<sup>2</sup>, Provinsi Lampung 34.623,80 km<sup>2</sup>, Provinsi Bengkulu 19.919,33 km<sup>2</sup>, Provinsi Kep.Bangka Belitung 16.424,06 km<sup>2</sup>,

dan wilayah yang terkecil ialah Provinsi Kepulauan Riau 8.201,72 km<sup>2</sup> atau 0,43% dari luas wilayah Indonesia.

#### **4.2 Kondisi Kependudukan di Pulau Sumatera**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS, 2022). Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi di wilayah tersebut. Jumlah penduduk merupakan modal yang dapat digunakan pada suatu daerah, karena keberadaan sumber daya manusia yang diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan baik.

Di pulau Sumatera secara umum didiami oleh bangsa Melayu yang terbagi dalam berbagai suku yaitu Suku Melayu, Suku Batak, Suku Aceh, Suku Komerling, Suku Basemah, Suku Rejang, Suku Minangkabau, Suku Ogan, dan Suku Lampung. Adapun yang bermukim etnis Tionghoa seperti di wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dan di kota-kota besar seperti Batam, Medan, Pekanbaru, Palembang, dan juga Bandar Lampung. Mata pencaharian masyarakat yang berada di Pulau Sumatera sebagian besar adalah petani, nelayan, dan pedagang. Masyarakat mayoritas beragama Islam dan sisanya beragama Kristen Protestan seperti di daerah Tapanuli dan Toba-Samosir serta di daerah Sumatera Utara, ada juga yang beragama Buddha di daerah Batam, Pekanbaru, Medan, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung. Pada tabel 4.2 terdapat data perkembangan jumlah penduduk provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Orang)**

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk						Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Aceh	5.189.466	5.281.314	5.371.532	5.274.871	5.333.733	5.407.855	5.309.795
	Perkembangan (%)	-	1,76	1,70	-1,79	1,11	1,38	0,83
2.	Sumatera Utara	14.262.147	14.415.391	14.562.549	14.703.532	14.936.148	15.115.206	14.665.829
	Perkembangan (%)	-	1,07	1,02	0,96	1,58	1,19	1,16
3.	Sumatera Barat	5.321.489	5.382.077	5.441.197	5.534.472	5.580.232	5.640.629	5.483.349
	Perkembangan (%)	-	1,14	1,09	1,71	0,82	1,08	1,16
4.	Riau	6.657.911	6.814.909	6.971.745	6.394.087	6.493.603	6.614.384	6.657.773
	Perkembangan (%)	-	2,35	2,30	-8,28	1,55	1,85	-0,04
5.	Jambi	3.515.017	3.570.272	3.624.579	3.548.228	3.585.119	3.631.136	3.579.059
	Perkembangan (%)	-	1,57	1,52	-2,10	1,03	1,28	0,66
6.	Sumatera Selatan	8.266.983	8.391.489	8.497.196	8.467.432	8.550.849	8.657.008	8.471.826
	Perkembangan (%)	-	1,50	1,25	-0,35	0,98	1,24	0,92
7.	Bengkulu	1.934.269	1.963.300	1.991.838	2.010.670	2.032.942	2.060.092	1.998.852
	Perkembangan (%)	-	1,50	1,45	0,94	1,10	1,33	1,26
8.	Lampung	8.289.577	8.370.485	8.447.737	9.007.848	9.081.792	9.176.546	8.728.998
	Perkembangan (%)	-	0,97	0,92	6,63	0,82	1,04	2,07
9.	Kep.Bangka Belitung	1.430.865	1.459.873	1.488.792	1.455.678	1.473.165	1.494.621	1.467.166
	Perkembangan (%)	-	2,02	1,98	-2,22	1,20	1,45	0,88
10.	Kep. Riau	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564	2.118.239	2.179.820	2.128.582
	Perkembangan (%)	-	2,58	2,48	-5,71	2,59	2,90	0,96
11.	Pulau Sumatera	56.950.418	57.785.631	58.586.818	58.461.382	59.185.822	59.977.297	58.491.228
	Perkembangan (%)	-	1,46	1,38	-0,21	1,23	1,33	1,03

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (Diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.2, dapat dilihat secara total penduduk di Pulau Sumatera dari tahun 2017-2022 secara umum sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk. Total jumlah penduduk di Pulau Sumatera terbanyak terjadi pada tahun 2022 sebesar 59.977.297 orang, dengan perkembangan penduduk sebesar 1,33%. Adapun jumlah penduduk terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu berjumlah 15.115.206 orang, dengan rata-rata perkembangan penduduk selama tahun 2017-2022 sebesar 1,16% dimana angka ini lebih tinggi daripada rata-rata perkembangan Pulau Sumatera yang hanya 1,03%, selanjutnya diikuti oleh Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk sebanyak 9.176.546 orang dengan rata-rata perkembangan tiap tahunnya adalah 2,07%, angka ini juga lebih besar dibandingkan rata-rata perkembangan Pulau Sumatera, dan diikuti juga oleh

Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 8.657.008 orang dengan rata-rata perkembangannya sebesar 0,92%.

Sedangkan untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit di Pulau Sumatera pada tahun 2022 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah penduduk sebanyak 1.494.621 orang, Provinsi Bengkulu sebanyak 2.060.092 jiwa, kemudian Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2.179.820 orang. Walaupun Provinsi Bengkulu memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit namun rata-rata perkembangan penduduknya selama tahun 2017-2022 sebesar 1,26% lebih tinggi dibandingkan rata-rata perkembangan Pulau Sumatera.

Peningkatan dan penurunan jumlah penduduk dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Peningkatan jumlah penduduk disebabkan oleh faktor kelahiran yang lebih besar daripada faktor kematian. Selain itu, faktor migrasi juga mempengaruhi jumlah penduduk. Apabila penduduk yang masuk ke Pulau Sumatera lebih banyak daripada yang keluar, maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, faktor ekonomi dan pembangunan juga bisa mempengaruhinya, jika peluang kerja banyak dan terdapat peningkatan taraf hidup suatu daerah maka dapat menarik masyarakat untuk tinggal dan bekerja di wilayah tersebut.

#### **4.3 Kondisi Perekonomian di Pulau Sumatera**

Suatu perekonomian dikatakan mengalami peningkatan apabila tingkat pendapatan ekonomi wilayah yang telah dicapai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi suatu wilayah semakin baik jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin besar setiap tahunnya. Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. PDRB dapat digunakan untuk membandingkan ukuran perekonomian antara wilayah atau negara yang berbeda. Untuk melihat perkembangan PDRB provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Miliar Rupiah)**

No.	Provinsi	Tahun						Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Aceh	121.240,98	126.824,37	132.069,62	131.580,97	135.251,19	140.947,64	131.319,13
	Perkembangan (%)	-	4,60	4,13	-0,37	2,78	4,21	3,07
2.	Sumatera Utara	487.531,23	512.762,63	539.513,85	533.746,36	547.651,82	573.528,77	532.455,77
	Perkembangan (%)	-	5,17	5,21	-1,06	2,60	4,72	3,33
3.	Sumatera Barat	155.984,36	163.996,19	172.205,57	169.426,61	175.000,50	182.629,54	169.873,79
	Perkembangan (%)	-	5,13	5,01	-1,61	3,28	4,35	3,23
4.	Riau	470.983,51	482.064,63	495.607,05	489.995,75	506.471,91	529.532,98	495.775,97
	Perkembangan (%)	-	2,35	2,80	-1,13	3,36	4,55	2,38
5.	Jambi	136.501,71	142.902,00	149.111,09	148.354,25	153.825,49	161.717,68	148.735,37
	Perkembangan (%)	-	4,68	4,34	-0,50	3,68	5,13	3,46
6.	Sumatera Selatan	281.571,01	298.484,07	315.464,75	315.129,22	326.411,27	343.483,65	313.423,99
	Perkembangan (%)	-	6,01	5,68	-0,10	3,58	5,23	4,08
7.	Bengkulu	42.073,52	44.164,11	46.345,45	46.338,43	47.853,78	49.916,06	46.115,22
	Perkembangan (%)	-	4,96	4,93	-0,15	3,27	4,30	3,46
8.	Lampung	220.626,10	232.165,99	244.378,31	240.319,59	246.966,49	257.534,19	240.331,77
	Perkembangan (%)	-	5,23	5,26	-1,66	2,76	4,27	3,17
9.	Kep. Bangka Belitung	49.985,15	52.208,04	53.941,90	52.705,94	55.369,65	57.803,20	53.668,98
	Perkembangan (%)	-	4,44	3,32	-2,29	5,05	4,39	2,98
10.	Kep. Riau	166.081,68	173.498,75	181.877,67	174.959,21	180.952,44	190.163,70	177.922,24
	Perkembangan (%)	-	4,46	4,82	-3,80	3,42	5,09	2,79
	Pulau Sumatera	2.132.579,25	2.229.070,78	2.330.515,26	2.302.556,33	2.375.754,54	2.487.257,41	2.309.622,26
	Perkembangan (%)	-	4,52	4,55	-1,20	3,17	4,69	3,14

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (Diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.3 menunjukkan jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Pulau Sumatera tahun 2017-2022, perekonomian di Pulau Sumatera sudah mengalami peningkatan selama tahun 2017-2019 dan tahun 2021-2022 yang juga meningkat tetapi pada tahun 2020 setiap provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan cukup besar. Penurunan ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan tentunya juga akan berdampak terhadap perekonomian atau aktifitas ekonomi masyarakat di Pulau Sumatera.

Perekonomian di Pulau Sumatera sebagian besar disumbang oleh Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara merupakan penyumbang terbesar pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.573.528,77 miliar dengan perkembangan sebesar 4,72% dimana rata-rata perkembangan PDRB ADHK selama tahun 2017-2022 yaitu 3,33%, kemudian diikuti oleh Provinsi Riau sebesar Rp.529.532,98 miliar dengan perkembangan sebesar 4,55%, dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.343.483,65 miliar dengan perkembangan 5,23%. Adapun provinsi dengan rata-rata perkembangan PDRB ADHK tahun 2010 selama periode 2017-2022 tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,08% dan angka ini jauh lebih besar daripada rata-rata Pulau Sumatera yang hanya sebesar 3,14%.

Sedangkan kontribusi PDRB yang relatif rendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar Rp.49.916,06 miliar dengan perkembangannya yaitu 4,30% dan Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp.57.803,20 miliar dengan jumlah perkembangan sebesar 4,39%. Adapun provinsi dengan rata-rata perkembangan dari tahun 2017-2022 yang paling rendah yaitu Provinsi Riau sebesar 2,38%, angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata Pulau Sumatera.

#### **4.4 Kondisi Ketenagakerjaan di Pulau Sumatera**

Ketenagakerjaan adalah salah satu aspek penting yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan penduduk, karena berkaitan dengan dimensi ekonomi, yang dimana kebutuhan manusia dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan dikatakan berhasil apabila masyarakat hidup dengan sejahtera. Tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja yang dianggap dapat bekerja dan sanggup melakukan pekerjaan. Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi agar dapat membantu jalannya proses pembuatan dan pengolahan barang dan jasa. Tenaga kerja yang ahli akan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan mampu menarik perhatian masyarakat sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi. Berikut pada tabel 4.4 terdapat data perkembangan kondisi ketenagakerjaan provinsi di Pulau Sumatera adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 4 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Orang)**

No.	Provinsi	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran
1.	Aceh	14.688.797	13.755.124	933.673
	Perkembangan (%)	2,23	2,31	1,12
2.	Sumatera Utara	44.139.261	41.493.474	2.645.787
	Perkembangan (%)	2,69	2,58	5,27
3.	Sumatera Barat	16.198.963	15.216.549	982.414
	Perkembangan (%)	2,94	2,79	6,16
4.	Riau	19.008.763	17.965.322	1.043.441
	Perkembangan (%)	2,25	2,65	-3,67
5.	Jambi	10.829.047	10.349.953	479.094
	Perkembangan (%)	1,81	1,66	6,11
6.	Sumatera Selatan	25.737.522	24.521.518	1.216.004
	Perkembangan (%)	1,76	1,70	3,47
7.	Bengkulu	6.239.676	6.014.203	225.473
	Perkembangan (%)	2,14	2,17	2,16
8.	Lampung	26.354.182	25.198.598	1.155.584
	Perkembangan (%)	2,47	2,43	3,64
9.	Kepulauan Bangka Belitung	4.390.481	4.199.516	190.965
	Perkembangan (%)	1,90	1,69	8,38
10.	Kepulauan Riau	6.655.629	6.083.764	571.865
	Perkembangan (%)	5,45	5,22	10,26
	Pulau Sumatera	174.242.321	164.798.021	9.444.300
	Perkembangan (%)	12,24	12,06	18,18
	Rata-Rata (%)	2,45	2,41	3,64

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (Diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.4, dapat dilihat perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 yang terdiri dari angkatan kerja dan Penduduk Bekerja. Perkembangan angkatan kerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 adalah sebesar 12,24 dengan rata-rata perkembangan sebesar 2,45%. Perkembangan angkatan kerja tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,45%, dan perkembangan angkatan kerja terendah di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,76%. Penurunan ini dapat terjadi karena banyaknya penduduk usia kerja di Pulau Sumatera yang lewat masa usia kerjanya sehingga mereka tidak termasuk dalam kelompok pekerja.

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.4, perkembangan jumlah orang yang bekerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022. Perkembangan orang bekerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 adalah sebesar 12,06% dengan rata-rata perkembangan sebesar 2,41%. Perkembangan orang bekerja tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,22%, dan perkembangan orang bekerja terendah berada pada Provinsi Jambi sebesar 1,66%.

Peningkatan yang tinggi tersebut terjadi karena jumlah usia kerja meningkat, sehingga pertambahan jumlah penduduk diiringi dengan jumlah orang yang bekerja juga meningkat. Kemudian, penurunan ini terjadi disebabkan oleh banyaknya pekerja yang sudah pensiun atau tidak bekerja lagi karena faktor umur. Untuk merealisasikan penyerapan tenaga kerja yang baik, diperlukan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia yang intensif di setiap provinsi Pulau Sumatera. Selain itu, diperlukan semakin memperluas kesempatan kerja agar tenaga kerja terserap dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompetensi dan berketerampilan yang baik.

Kemudian pada tabel 4.4 dapat dilihat perkembangan jumlah pengangguran di Pulau Sumatera tahun 2017-2022. Perkembangan jumlah pengangguran di Pulau Sumatera adalah sebesar 18,18% dengan rata-rata perkembangan sebesar 3,64%. Provinsi dengan jumlah perkembangan pengangguran tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan perkembangan sebesar 10,26% dan jumlah pengangguran dengan perkembangan terendah adalah Provinsi Riau sebesar -3,67%. Artinya, Provinsi Riau sudah dapat menyerap tenaga kerja dengan baik karena pengangguran di Provinsi Riau menurun sebesar 3,67%.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Perkembangan PDRB sektor industri pengolahan, Investasi, Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera**

Untuk menganalisis perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri pengolahan, investasi, upah, dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera, maka digunakanlah rumus perkembangan sehingga dapat diketahui dan bisa menganalisis perkembangan pada setiap variabel penelitian. Berikut ini adalah hasil analisis perkembangan pada masing-masing variabel penelitian :

##### **5.1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan di Pulau Sumatera**

PDRB adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, PDRB diciptakan oleh sektor perekonomian wilayah tersebut secara total dalam bentuk rupiah. Kondisi perekonomian yang baik secara tidak langsung akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, karena secara teori ketika besarnya jumlah output meningkat, maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan, begitupun sebaliknya (Hartono et al., 2018).

Di provinsi-provinsi Pulau Sumatera PDRB sangat berperan penting dalam lingkungan ketenagakerjaan. Jika Perkembangan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5. 1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Miliar Rupiah)**

No.	Provinsi	Tahun						Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Aceh	5.921,44	6.410,26	6.339,51	6.058,65	6.212,08	6.472,36	6.235,71
	Perkembangan (%)	-	8,26	-1,10	-4,43	2,53	4,19	1,89
2.	Sumatera Utara	92.777,25	96.174,60	97.362,10	96.548,31	97.928,00	99.867,07	96.776,22
	Perkembangan (%)	-	3,66	1,23	-0,84	1,43	1,98	1,49
3.	Sumatera Barat	16.540,81	16.444,84	16.118,64	16.031,82	16.628,38	16.917,96	16.447,07
	Perkembangan (%)	-	-0,58	-1,98	-0,54	3,72	1,74	0,47
4.	Riau	139.717,11	144.727,81	153.155,81	156.073,85	162.436,92	170.117	154.371,42
	Perkembangan (%)	-	3,59	5,82	1,91	4,08	4,73	4,03
5.	Jambi	14.640,67	15.137,37	15.495,29	15.513,67	15.711,11	16.190,71	15.448,13
	Perkembangan (%)	-	3,39	2,36	0,12	1,27	3,05	2,04
6.	Sumatera Selatan	53.270,83	56.146,10	58.852,89	59.276,64	60.571,42	63.231,36	58.558,20
	Perkembangan (%)	-	5,40	4,82	0,72	2,18	4,39	3,50
7.	Bengkulu	2.625,19	2.718,55	2.781,32	2.713,44	2.777,63	2.863,15	2.746,54
	Perkembangan (%)	-	3,56	2,31	-2,44	2,37	3,08	1,78
8.	Lampung	39.633,96	43.218,14	46.778,09	44.336,28	46.351,00	46.566,85	44.480,72
	Perkembangan (%)	-	9,04	8,24	-5,22	4,54	0,47	3,41
9.	Kep.Bangka Belitung	11.337,67	11.787,74	11.928,98	11.259,12	11.873,92	12.485,31	11.778,79
	Perkembangan (%)	-	3,97	1,20	-5,62	5,46	5,15	2,03
10.	Kep.Riau	62.436,28	65.018,04	69.079,81	71.325,79	75.925,35	79.378,16	70.527,23
	Perkembangan (%)	-	4,14	6,25	3,25	6,45	4,55	4,93
11.	Pulau Sumatera	438.901,21	457.783,45	477.892,44	479.137,57	496.415,81	514.089,93	477.370,03
	Perkembangan (%)	-	4,30	4,39	0,26	3,61	3,56	3,22

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 5.1, dapat dilihat bahwa jumlah PDRB sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, provinsi dengan PDRB tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Lampung sebesar 9,04% dan yang terendah adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar -0,58%. Pada tahun 2019, provinsi dengan PDRB tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Lampung sebesar 8,24% dan yang terendah adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar -1,98%. Pada tahun 2020, provinsi dengan PDRB tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,25% dan yang terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar -5,62%. Pada tahun 2021, provinsi dengan PDRB tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,45% dan yang terendah

adalah Provinsi Jambi sebesar 1,27%. Kemudian, pada tahun 2022, provinsi dengan PDRB tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,15% dan yang terendah adalah Provinsi Lampung sebesar 0,47%.

Peningkatan dan penurunan PDRB dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau suatu sektor perekonomian meningkat itu akan berdampak terhadap pada peningkatan jumlah PDRB. Sedangkan, jika terjadi peningkatan pengeluaran rutin pemerintah akan menurunkan PDRB (Putri & Poerwono, 2013).

**Tabel 5. 2 Rata-Rata Perkembangan PDRB menurut provinsi di Pulau Sumatera**

Provinsi	Rata-Rata Perkembangan (%)	Keterangan (Peringkat)
Aceh	1,89	7
Sumatera Utara	1,49	9
Sumatera Barat	0,47	10
Riau	4,03	2
Jambi	2,04	5
Sumatera Selatan	3,50	3
Bengkulu	1,78	8
Lampung	3,41	4
Kep. Bangka Belitung	2,03	6
Kepulauan Riau	4,93	1

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data pada tabel 5,2 menunjukkan bahwa provinsi dengan peringkat pertama yaitu dengan rata-rata perkembangan PDRB tertinggi di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,93%, kemudian peringkat kedua adalah Provinsi Riau sebesar 4,03%, peringkat ketiga adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,50%, peringkat keempat adalah Provinsi Lampung sebesar 3,41%, peringkat kelima adalah Provinsi Jambi sebesar 2,04%, peringkat keenam adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,03%, peringkat ketujuh adalah Provinsi Aceh sebesar 1,89%, peringkat kedelapan adalah Provinsi Bengkulu sebesar 1,78%, peringkat kesembilan adalah

Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,49%, selanjutnya peringkat kesepuluh adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,47%.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang memiliki perkembangan PDRB sektor industri pengolahan tertinggi karena adanya kegiatan produksi industri pengolahan yang tinggi terutama untuk produksi barang elektronik dan perkapalan. Industri pengolahan yang tinggi di topang oleh industri elektronik dan industri produk dari besi dan baja yang meningkat dari tahun sebelumnya. Karena industri elektronik merupakan salah satu komoditas atau barang produk ekspor yang memberikan kontribusi cukup besar sehingga PDRB Kepulauan Riau juga meningkat.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan perkembangan PDRB sektor industri pengolahan terendah karena pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan provinsi yang dominan dalam sektor pertanian. Deselerasi pada penurunan produksi CPO mempengaruhi kinerja industri pengolahan yang menurunkan permintaan secara global. Penurunan kinerja Industri Pengolahan sebagai akibat permintaan global yang menurun.

### **5.1.2 Perkembangan Investasi di Pulau Sumatera**

Investasi merupakan kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini dengan harapan dapat bermanfaat di masa yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena dengan investasi atau penanaman modal yang ada akan membuka suatu usaha baru sehingga dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Perkembangan investasi provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:

**Tabel 5.3 Perkembangan Investasi Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera (Miliar Rupiah)**

No.	Provinsi	Tahun						Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Aceh	242.947,0	326.129,9	550.285,3	1.243.817,9	1.496.926,8	1.159.039,7	836.524,4
	Perkembangan (%)	-	34,23	68,73	126,03	20,34	-22,57	45,35
2.	Sumatera Utara	14.961.137,8	5.407.834,4	6.805.683,2	7.200.415,5	5.130.205,5	8.109.056,5	7.935.722,2
	Perkembangan (%)	-	-63,85	25,84	5,80	-28,75	58,06	-0,58
3.	Sumatera Barat	992.232,8	1.379.190,2	1.186.601,6	1.552.752,8	1.353.414,5	1.527.612,1	1.331.967,3
	Perkembangan (%)		38,99	-13,96	30,85	-12,83	12,87	11,18
4.	Riau	17.863.754,1	11.080.233,2	17.537.083,0	18.008.000,7	24.448.723,8	36.984.727,2	20.987.087,0
	Perkembangan (%)	-	-37,97	58,27	2,68	35,76	51,27	22
5.	Jambi	1.370.008,5	1.879.578,2	832.332,3	500.909,1	1.843.822,9	2.398.243,9	1.470.815,8
	Perkembangan (%)	-	37,19	-55,71	-39,81	268,09	30,06	47,96
6.	Sumatera Selatan	11.167.996,1	10.841.506,6	3.197.455,5	11.434.379,2	2.002.833,1	8.972.427,3	7.936.099,6
	Perkembangan (%)	-	-2,92	-70,50	257,60	-82,48	347,98	89,93
7.	Bengkulu	60.558,2	229.615,0	1.015.271,4	737.102,3	903.095,3	1.443.054,3	731.449,4
	Perkembangan (%)	-	279,16	342,16	-27,39	22,51	59,78	135,24
8.	Lampung	1.669.643,5	1.984.600,9	1.587.094,3	2.086.888,3	1.929.385,5	4.443.821,1	2.283.572,3
	Perkembangan (%)	-	18,9	-20,02	31,49	-7,54	130,32	30,62
9.	Kep.Bangka Belitung	795.202,7	585.779,7	1.017.907,3	732.950,3	1.838.685,4	2.209.157,3	1.196.613,8
	Perkembangan (%)	-	-26,33	73,76	-27,99	150,86	20,14	38,08
10.	Kep. Riau	4.873.918,9	11.045.651,4	16.703.811,8	24.900.246,5	10.918.452,4	12.185.630,8	13.437.952
	Perkembangan (%)	-	126,62	51,22	49,06	-56,15	11,60	36,47
	Pulau Sumatera	53.997.399,6	44.760.119,5	50.433.525,6	68.397.462,5	51.865.545,3	79.432.770,2	58.147.803,8
	Perkembangan (%)		-17,1	12,67	35,61	-24,17	53,15	12,03

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 5.3, dapat dilihat bahwa perkembangan investasi pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, perkembangan investasi tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu sebesar 279,16% dan yang terendah adalah provinsi Sumatera Utara sebesar -63,85%. Pada tahun 2019, perkembangan investasi tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu sebesar 342,16% dan yang terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar -70,50%. Pada tahun 2020, perkembangan investasi tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 257,60% dan yang terendah adalah Provinsi Jambi sebesar -39,81. Pada tahun 2021, perkembangan investasi tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Jambi sebesar 268,09% dan yang terendah adalah

Provinsi Sumatera selatan sebesar -82,48%. Selanjutnya pada tahun 2022 perkembangan investasi tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 347,98% dan yang terendah adalah Provinsi Aceh sebesar -22,57%.

Tingginya peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan di tahun 2022 disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang banyak menguntungkan dan mempermudah investor terutama investor asing. Persebaran investasi yang tidak merata ini tentunya akan berdampak pada kesenjangan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja provinsi di Pulau Sumatera. Beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat investasi yaitu : infrastruktur yang tidak memadai yang menjadi hambatan bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Keterbatasan infrastruktur dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan dan mengurangi daya tarik investasi. Potensi pasar dan industri di suatu provinsi juga mempengaruhi minat investor. Jika terdapat potensi pertumbuhan yang tinggi, permintaan yang banyak dan peluang bisnis yang menjanjikan, investor mungkin akan lebih tertarik untuk melakukan investasi di provinsi tersebut.

**Tabel 5. 4 Rata-Rata Perkembangan Investasi tahun 2017-2022**

Provinsi	Rata-Rata Perkembangan (%)	Keterangan (Peringkat)
Aceh	45,35	4
Sumatera Utara	-0,58	10
Sumatera Barat	11,18	9
Riau	22	8
Jambi	47,96	3
Sumatera Selatan	89,93	2
Bengkulu	135,24	1
Lampung	30,62	7
Kep. Bangka Belitung	38,08	5
Kepulauan Riau	36,47	6

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa provinsi dengan peringkat pertama yaitu dengan rata-rata perkembangan investasi tertinggi di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 adalah Provinsi Bengkulu sebesar 135,24%,

peringkat kedua adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 89,93%, peringkat ketiga adalah Provinsi Jambi sebesar 47,96%, peringkat keempat adalah Provinsi Aceh sebesar 45,35%, peringkat kelima adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 38,08%, peringkat keenam adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 36,47%, peringkat ketujuh adalah Provinsi Lampung sebesar 30,62%, peringkat kedelapan adalah Provinsi Riau sebesar 22%, peringkat kesembilan adalah Provinsi Sumatera barat sebesar 11,18%, dan peringkat kesepuluh adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar -0,58%.

Provinsi Bengkulu sebagai investasi terbesar di Pulau Sumatera karena banyak investor yang menanamkan modalnya pada sektor perkebunan, infrastruktur, transportasi, industri kesehatan dan pertambangan. Adapun investasi yang meningkat dicapai dari perusahaan lama yang melanjutkan kontraknya. Salah satu alasan para investor memilih menanamkan investasinya karena daerah tersebut terdapat ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah utamanya dari sektor kelistrikan panas bumi di kabupaten Lebong dan PLTU di kota Bengkulu. Ketersediaan lahan, daya terpasang dan penyediaan air bersih dinilai menjadi salah satu faktor untuk kemudahan berinvestasi di Provinsi Bengkulu. dalam perkembangannya investasi yang tumbuh disesuaikan dengan daya dukung sumber daya alam yang berlimpah.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki investasi yang terendah karena Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur. Meski indeks kesejahteraan petani/nelayan yang cukup tinggi, sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor unggulan namun mengalami pertumbuhan yang lambat. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh biaya investasi yang mahal. Berdasarkan hasil perhitungan ICOR (incremental capital Output Ratio), ICOR Sumut dan Kota Medan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya efisiensi investasi di Sumatera Utara. Tingginya ICOR di Provinsi Sumatera Utara menyebabkan para investor untuk mengurungkan niatnya untuk berinvestasi, khususnya pada sektor pertanian/perikanan dan industri pengolahan.

### 5.1.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera

Upah merupakan suatu balas jasa atas tenaga kerja yang akan diberikan oleh perusahaan sebagai imbalan atas hasil jasa tenaga kerja dalam memproduksi atau mengelola suatu barang dan jasa. Tingkat upah di setiap provinsi di Pulau Sumatera berbeda-beda karena adanya perbedaan tingkat perekonomian dan biaya hidup di setiap daerah itu berbeda-beda. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. Perkembangan upah minimum provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini:

**Tabel 5. 5 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)**

No.	Provinsi	Tahun						Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Aceh	2.500.000	2.700.000	2.916.810	3.165.031	3.165.031	3.166.460	2.935.555
	Perkembangan (%)		8	8,03	8,51	0	0,04	4,92
2.	Sumatera Utara	1.961.354	2.132.189	2.303.403	2.499.423	2.499.423	2.522.610	2.319.734
	Perkembangan (%)		8,71	8,03	8,51	0	0,93	4,36
3.	Sumatera Barat	1.949.285	2.119.067	2.289.220	2.484.041	2.484.041	2.512.539	2.306.366
	Perkembangan (%)		8,71	8,03	8,51	0	1,15	4,4
4.	Riau	2.266.723	2.464.154	2.662.026	2.888.564	2.888.564	2.938.564	2.684.766
	Perkembangan (%)		8,71	8,03	8,51	0	1,73	5,45
5.	Jambi	2.063.949	2.243.719	2.423.889	2.630.162	2.630.162	2.699.033	2.448.486
	Perkembangan (%)		8,71	8,03	8,51	0	2,62	5,57
6.	Sumatera Selatan	2.388.000	2.595.995	2.804.453	3.043.111	3.043.111	3.144.446	2.836.519
	Perkembangan (%)		8,71	8,03	8,51	0	3,33	5,72
7.	Bengkulu	1.730.000	1.888.741	2.040.407	2.213.604	2.213.604	2.238.094	2.054.075
	Perkembangan (%)		9,17	8,03	8,49	0	1,11	5,36
8.	Lampung	1.908.448	2.074.673	2.241.270	2.432.002	2.432.002	2.440.486	2.254.814
	Perkembangan (%)		8,71	8,03	8,51	0	0,35	5,12
9.	Kep.Bangka Belitung	2.534.674	2.755.444	2.976.706	3.230.024	3.230.024	3.264.884	2.998.626
	Perkembangan (%)		8,71	8,03	8,51	0	1,08	5,27
10.	Kep. Riau	2.358.454	2.563.875	2.769.754	3.005.460	3.005.460	3.050.172	2.792.196
	Perkembangan (%)		8,71	8,03	8,51	0	1,49	5,35
11.	Pulau Sumatera	21.660.887	23.537.857	25.427.938	27.591.422	27.591.422	27.977.288	25.631.136
	Perkembangan (%)		8,67	8,03	8,51	0	1,40	5,32

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 5.5 terlihat bahwa UMP di Pulau Sumatera cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2021 tidak terjadi penurunan maupun peningkatan UMP dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, provinsi dengan perkembangan upah minimum provinsi tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu sebesar 9,17% dan perkembangan upah minimum provinsi terendah adalah Provinsi Aceh sebesar 8%. Pada tahun 2019, upah minimum provinsi di Pulau Sumatera memiliki perkembangan yang sama yaitu sebesar 8,03%. Pada tahun 2020, terdapat sembilan provinsi dengan perkembangan upah minimum provinsi yang sama sebesar 8,51% dan yang terendah adalah provinsi Bengkulu sebesar 8,49%. Pada tahun 2021, perkembangan upah minimum provinsi di Pulau Sumatera tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2022, perkembangan upah minimum provinsi tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,33% dan upah minimum provinsi terendah adalah Provinsi Aceh sebesar 0,04%.

Perkembangan UMP terendah di Pulau Sumatera terjadi di Provinsi Sumatera Utara dengan perkembangan sebesar 4,36%. Rendahnya perkembangan tersebut disebabkan oleh keputusan pemerintah dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Provinsi berdasarkan pada kondisi ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan, sehingga hal ini tidak dapat dipisahkan dari kinerja makro ekonomi yang telah dicapai oleh Provinsi tersebut. Perkembangan upah minimum di Pulau Sumatera cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal diharapkan dengan kebijakan ini berpengaruh nyata dengan kesejahteraan yang harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

**Tabel 5. 6 Rata-Rata Perkembangan Upah Minimum Provinsi**

Provinsi	Rata-Rata Perkembangan (%)	Keterangan (Peringkat)
Aceh	4,92	8
Sumatera Utara	4,36	10
Sumatera Barat	4,4	9
Riau	5,45	3
Jambi	5,57	2
Sumatera Selatan	5,72	1
Bengkulu	5,36	4
Lampung	5,12	7
Kep. Bangka Belitung	5,27	6
Kepulauan Riau	5,35	5

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa provinsi dengan peringkat pertama yaitu dengan rata-rata perkembangan Upah Minimum Provinsi tertinggi di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,72%, peringkat kedua adalah Provinsi Jambi sebesar 5,57%, peringkat ketiga adalah Provinsi Riau sebesar 5,45%, peringkat keempat adalah Provinsi Bengkulu sebesar 5,36%, peringkat kelima adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,35%, peringkat keenam adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,27%, peringkat ketujuh adalah Provinsi Lampung sebesar 5,12%, peringkat kedelapan adalah Provinsi Aceh sebesar 4,92%, peringkat kesembilan adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,4%, peringkat kesepuluh adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,36%.

Sumatera selatan merupakan upah minimum provinsi dengan perkembangan yang tertinggi karena kenaikan ini menyesuaikan perkembangan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. UMP dinaikkan karena penyesuaian terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan kebutuhan hidup layak bagi parah buruh. Kemudian Provinsi Sumatera utara merupakan upah minimum provinsi dengan peningkatan yang rendah terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang rendah sedangkan inflasi yang meningkat. Hal ini berarti terjadi pergeseran daya beli masyarakat yang tidak konsisten dan tidak terduga.

#### 5.1.4 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera

Salah satu faktor produksi dalam keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu penduduk (tenaga kerja). Tenaga kerja yang dapat mengelola penggunaan faktor-faktor produksi lainnya, yang akan digunakan dalam proses produksi barang maupun jasa. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam hal produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi lainnya. Adapun perkembangan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut:

**Tabel 5. 7 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera (Orang)**

No.	Provinsi	Tahun						Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Aceh	146.960	174.649	185.183	194.928	197.345	175.231	179.049
	Perkembangan (%)	-	18,84	6,03	5,26	1,24	-11,2	4,03
2.	Sumatera Utara	574.570	687.491	662.386	655.552	682.605	720.482	663.848
	Perkembangan (%)	-	19,65	-3,65	-1,03	4,13	5,55	4,93
3.	Sumatera Barat	199.994	210.052	232.639	244.086	231.074	230.775	224.770
	Perkembangan (%)	-	5,03	10,72	4,92	-5,33	-0,13	3,04
4.	Riau	198.468	217.092	231.736	230.213	257.595	230.084	227.531
	Perkembangan (%)	-	9,38	6,74	-0,66	11,89	-10,68	3,33
5.	Jambi	74.317	85.318	93.625	87.520	83.099	94.420	86.383
	Perkembangan (%)	-	14,8	9,74	-6,52	-5,05	13,62	5,32
6.	Sumatera Selatan	279.370	578.353	539.411	524.583	565.604	565.834	508.859
	Perkembangan (%)	-	107,02	-6,73	-2,75	7,82	0,04	21,08
7.	Bengkulu	48.474	52.647	57.322	55.954	58.588	53.218	54.367
	Perkembangan (%)	-	8,61	8,88	-2,39	4,71	-9,16	2,13
8.	Lampung	605.893	659.987	756.375	670.282	690.275	668.876	625.308
	Perkembangan (%)	-	8,93	14,6	-11,38	2,98	-3,1	23,75
9.	Kep.Bangka Belitung	42.623	47.834	54.396	57.293	53.363	50.185	50.949
	Perkembangan (%)	-	12,22	13,72	5,32	-6,86	-5,95	3,69
10.	Kep. Riau	191.572	232.552	246.487	231.405	271.944	297.852	245.302
	Perkembangan (%)	-	21,39	5,99	-6,12	17,52	9,53	9,66
11.	Pulau Sumatera	2.362.241	2.945.975	3.059.560	2.951.816	3.091.492	3.086.957	2.866.366
	Perkembangan (%)	-	24,71	3,86	-3,52	4,73	-0,15	5,93

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 5.7 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor industri tahun 2017-2022 cenderung meningkat dan rata-rata perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2018, provinsi dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 107,02 % dan yang terendah adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,03%. Pada tahun 2019, provinsi dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Lampung sebesar 14,6% dan yang terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar -6,73%. Pada tahun 2020, provinsi dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,32% dan yang terendah adalah Provinsi Lampung sebesar -11,38%. Pada tahun 2021, provinsi dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 17,52% dan yang terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar -6,86%. Kemudian pada tahun 2022, provinsi dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Jambi sebesar 13,62% dan yang terendah adalah Provinsi Aceh sebesar -11,2%.

**Tabel 5. 8 Rata-rata Perkembangan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera**

Provinsi	Rata-Rata Perkembangan (%)	Keterangan (Peringkat)
Aceh	4,03	6
Sumatera Utara	4,93	5
Sumatera Barat	3,04	9
Riau	3,33	8
Jambi	5,32	4
Sumatera Selatan	21,08	2
Bengkulu	2,13	10
Lampung	23,75	1
Kep. Bangka Belitung	3,69	7
Kepulauan Riau	9,66	3

Sumber :Data diolah

Berdasarkan data pada tabel 5,8 menunjukkan bahwa provinsi dengan peringkat pertama yaitu pada rata-rata perkembangan penyerapan tenaga kerja

tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Lampung sebesar 23,75%, peringkat kedua adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 21,08%, peringkat ketiga adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,66%, peringkat keempat adalah Provinsi Jambi sebesar 5,32%, peringkat kelima adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,93%, peringkat keenam adalah Provinsi Aceh sebesar 4,03%, peringkat ketujuh adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,69%, peringkat kedelapan adalah Provinsi Riau sebesar 3,33%, peringkat kesembilan adalah Provinsi Sumatera barat sebesar 3,04, kemudian perkembangan penyerapan tenaga kerja peringkat kesepuluh adalah Provinsi Bengkulu sebesar 2,13%

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan penyerapan tenaga kerja yang peningkatannya tertinggi karena turunnya angka pengangguran di desa karena Dana Desa yang bersifat padat karya serta dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat sehingga menyerap tenaga kerja di desa. Sedangkan, Provinsi Bengkulu merupakan peningkatan penyerapan tenaga kerja terendah karena masih rendahnya kompetensi atau keterampilan pekerjanya dalam kebutuhan pasar kerja sehingga mengakibatkan kemiskinan meningkat dan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit.

## **5.2 Pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan, Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera**

### **5.2.1 Analisis Model Regresi Data Panel**

Analisis model regresi data panel merupakan tahap pemilihan dalam menentukan model terbaik dengan menggunakan beberapa uji diantaranya yaitu uji Chow, Hausman, Lagrange Multiplier (LM). Tiga uji tersebut berguna untuk menjawab bagaimana pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, investasi, upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera. Berikut adalah penjelasan hasil regresi pengujian model terbaik beserta hasil model terbaik setelah dilakukan pengujian yakni sebagai berikut :

#### **5.2.1.1 Uji Chow**

Uji Chow digunakan untuk menentukan pemilihan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 5. 9 Hasil Uji Chow**

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
<b>Cross-section F</b>	192.332711	(9,47)	0.0000
<b>Cross-section Chi-square</b>	217.985620	9	0.0000

Sumber : Olah data Eviews 12 (2023)

Berdasarkan pada tabel 5.9, hasil dari pengujian uji chow diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000, artinya probabilitas F lebih kecil dari signifikansi ( $0,0000 < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan model *Common Effect Model* (CEM).

### 5.2.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan pemilihan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* (REM) dalam regresi data panel.

**Tabel 5. 10 Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
<b>Cross-section random</b>	5.923362	3	0.1154

Sumber : Olah data Eviews 12 (2023)

Berdasarkan pada tabel 5.10, hasil dari uji hausman pada penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,1154. Artinya nilai probabilitasnya lebih besar dari pada  $\alpha = 0,05$  ( $0,1154 > 0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  Ditolak. Dengan demikian, maka model terbaik pada pengujian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

### 5.2.1.3 Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji Langrange Multiplier digunakan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada model *Common Effet* .

**Tabel 5. 11 Hasil Uji Langrange Multiplier**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
<b>Breusch-Pagan</b>	103.9107 (0.0000)	1.423425 (0.2328)	105.3341 (0.0000)

Sumber : Olah data Eviews 12 (2023)

Keterangan : ( ) = Prob

Dari keterangan tabel 5.11, hasil dari pengujian uji langrange multiplier diperoleh nilai Prob. Breusch-Pagan sebesar 0,0000. Dikarenakan nilai probabilitas F lebih kecil dibandingkan pada  $\alpha = 0,05$  ( $0,0000 < 0,05$ ), sehingga hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model terbaik pada pengujian *langrange multiplier* dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan hasil pengujian-pengujian diatas, bahwa model fixed effect model hanya terpilih satu kali yaitu pada uji chow, sedangkan model Random Effect Model telah terpilih dua kali yaitu pada uji hausman dan uji langrange multiplier. Dengan demikian maka dari ketiga model (CEM, FEM, REM), model yang lebih baik di interpretasikan pada regresi data panel yaitu model Random Effect Model (REM).

### 5.2.2 Estimasi Model Data Panel

Dalam REM metode yang digunakan adalah Generalized Least Square (GLS). Berikut merupakan hasil dari regresi nilai PDRB sektor industry, Investasi dan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.

**Tabel 5. 12 Hasil Estimasi Regresi Data Panel Terbaik dengan Metode REM**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>C</b>	-25800.08	82934.49	-0.311090	0.7569
<b>PDRB</b>	3.630268	1.061045	3.421410	0.0012
<b>INV</b>	-0.004514	0.001376	-3.279428	0.0018
<b>UMP</b>	0.066475	0.021196	3.136195	0.0027

Sumber : Olah data Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan Random Effect Model diatas maka dapat dituliskan persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$PTK_{it} = -25800.08 + 3.630268 \text{ PDRB} - 0.004514 \text{ INV} + 0.066475 \text{ UMP}$$

Berdasarkan persamaan model diatas dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap Random Effect Model. Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -25800.08. artinya bila diasumsikan antara PDRB, Investasi dan upah minimum provinsi konstan atau tetap maka penyerapan tenaga kerja yang ada di Pulau Sumatera berkurang sebesar 25800.08 orang.

Adapun penjelasannya adalah :

1. Nilai koefisien variabel PDRB sebesar 3.630268. Hal ini memiliki arti bahwa setiap PDRB meningkat 1 miliar rupiah maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 3.630.268 orang dengan asumsi variabel investasi dan upah dianggap tetap atau konstan.
2. Nilai koefisien variabel INV sebesar -0,004514. Hal ini memiliki arti bahwa setiap nilai investasi meningkat sebesar 1 miliar rupiah, maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 4.514 orang dengan asumsi variabel PDRB sektor industri pengolahan dan upah dianggap tetap atau konstan.
3. Nilai koefisien UMP sebesar 0,066475. Hal ini memiliki arti bahwa setiap Upah Minimum Provinsi meningkat 1 juta rupiah, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sebesar 66.475 orang dengan asumsi variabel PDRB sektor industri pengolahan dan investasi dianggap tetap atau konstan.

### 5.2.3 Uji Hipotesis

#### 5.2.3.1 Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara Bersama- sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh PDRB, INV dan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2017-2022.

**Tabel 5. 13 Hasil Uji F-statistik**

<b>F-statistic</b>	<b>Prob (F-statistic)</b>
11.86579	0.000004

*Sumber : Olah data Eviews 12 (2023)*

Berdasarkan hasil regresi diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 11.86579 dengan nilai Prob.  $0.000004 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel maka F-hitung sebesar  $11.86579 > F\text{-tabel}$  sebesar 2,77, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya

variabel PDRB, INV, UMP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

### 5.2.3.2 Uji t

Uji t dilakukan untuk membuktikan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara individu

**Tabel 5. 14 Hasil Uji t-statistik**

<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
<b>C</b>	-25800.08	82934.49	-0.311090	0.7569
<b>PDRB</b>	3.630268	1.061045	3.421410	0.0012
<b>INV</b>	-0.004514	0.001376	-3.279428	0.0018
<b>UMP</b>	0.066475	0.021196	3.136195	0.0027

*Sumber : Olah data Eviews 12 (2023)*

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel pada tabel 5.14 diketahui bahwa :

- a. Variabel PDRB memiliki nilai koefisien sebesar 3.630268 dan memiliki nilai t-hitung sebesar 3.421410 > t-tabel yaitu 2.00324 dengan probabilitas sebesar 0.0012 yang dimana lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$  ( $0.0012 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.
- b. Variabel INV memiliki nilai koefisien sebesar -0.004514 dan memiliki nilai t-hitung sebesar -3.279428 < t-tabel yaitu 2.00324 dengan probabilitas sebesar 0.0018 yang dimana ini lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$  ( $0.0018 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.
- c. Variabel UMP memiliki nilai koefisien sebesar 0.066475 dan memiliki nilai t-hitung sebesar 3.136195 > t-tabel yaitu 2.00324 dengan probabilitas sebesar 0.0027 dimana lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$  ( $0.0027 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

### 5.2.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat.

**Tabel 5. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	Adjusted R-squared
0.388629	0.355877

Sumber : Olah Data Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil estimasi model Random Effect Model, diperoleh nilai R-squared sebesar 0.388629 atau 38,86%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PDRB, INV dan UMP mampu menjelaskan variabel Penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera sebesar 38,86% sedangkan sisanya yaitu 61,14% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Data intersep (individual effect) masing-masing provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5. 16 Individual Effect Masing-Masing Provinsi di Pulau Sumatera (Metode REM)**

Provinsi	Individual Effect
Aceh	-9104.134
Sumatera Utara	218793.5
Sumatera Barat	43333.19
Riau	-388782.2
Jambi	-99498.58
Sumatera Selatan	168459.0
Bengkulu	-62717.08
Lampung	397939.2
Kep. Bangka Belitung	-159108.7
Kepulauan Riau	-109314.1

Sumber : Data diolah Eviews 12 (2023)

Berdasarkan estimasi individual effect tersebut dapat dijelaskan intersep dalam hasil estimasi menggunakan metode REM adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Aceh

Apabila terjadi perubahan PDRB industri pengolahan, investasi dan upah minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka provinsi Aceh akan

mendapatkan pengaruh individual terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar -9104.134 orang.

2. Provinsi Sumatera Utara

Apabila terjadi perubahan PDRB industri pengolahan, investasi dan upah minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka provinsi Sumatera Utara akan mendapatkan pengaruh individual terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 218793.5 orang.

3. Provinsi Sumatera Barat

Apabila terjadi perubahan PDRB industri pengolahan, investasi dan upah minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka provinsi Sumatera Barat akan mendapatkan pengaruh individual terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 43333.19 orang.

4. Provinsi Riau

Apabila terjadi perubahan PDRB industri pengolahan, investasi dan upah minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka provinsi Riau akan mendapatkan pengaruh individual terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar -388782.2 orang.

5. Provinsi Jambi

Apabila terjadi perubahan PDRB industri pengolahan, investasi dan upah minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka provinsi Jambi akan mendapatkan pengaruh individual terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar -99498.58 orang.

6. Provinsi Sumatera Selatan

Apabila terjadi perubahan PDRB industri pengolahan, investasi dan upah minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka provinsi Sumatera Selatan akan mendapatkan pengaruh individual terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 168459.0 orang.

7. Provinsi Bengkulu

Apabila terjadi perubahan PDRB industri pengolahan, investasi dan upah minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka provinsi Bengkulu

akan mendapatkan pengaruh individual terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar -62717.08 orang.

8. Provinsi Lampung

Apabila terjadi perubahan PDRB industri pengolahan, investasi dan upah minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka provinsi Lampung akan mendapatkan pengaruh individual terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 397939.2 orang.

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Apabila terjadi perubahan PDRB industri pengolahan, investasi dan upah minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendapatkan pengaruh individual terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar -159108.7 orang.

10. Provinsi Kepulauan Riau

Apabila terjadi perubahan PDRB industri pengolahan, investasi dan upah minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan pengaruh individual terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar -109314.1 orang.

### 5.3 Analisis Ekonomi

#### 5.3.1 Pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pada hasil regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model*, variabel PDRB mempunyai nilai koefisien PDRB sebesar 3.630268 dan variabel tetap atau konstan maka dapat diartikan ketika PDRB sektor industri pengolahan meningkat satu persen maka penyerapan tenaga kerja di provinsi yang ada di Pulau Sumatera meningkat sebesar 3.630268. Selain itu hasil olahan data juga diperoleh variabel PDRB memiliki nilai t-hitung sebesar 3.421410 dengan probabilitas sebesar 0.0012 atau lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$  ( $0.0012 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa

PDRB sektor industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Widyaningrum & Bintariningtyas (2021), (Wasilaputri, 2016), (Maghfiroh et al., 2020) juga mendapat hasil yang sama bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya jika PDRB meningkat maka sektor industri akan meningkatkan kapasitas produksinya begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi bahwa, apabila nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga akan meningkat, semakin besar output atau penjualan yang dilakukan oleh suatu industri maka akan mendorong unit industri untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan tersebut.

### **5.3.2 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan regresi data panel model Random Effect Model bahwa variabel investasi memiliki nilai koefisien regresi dari variabel INV ialah sebesar -0.004514 dan t-hitung sebesar -3,279428 dengan probabilitas sebesar 0,0018 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$  ( $0.0018 < 0,05$ ). Artinya variabel investasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian Ali et al., (2020) dan penelitian Cahyadi (2018) yang menyatakan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena pemilik usaha dalam menggunakan investasinya lebih cenderung untuk melakukan pembelian barang modal dalam bentuk mesin-mesin sebagai pendukung proses produksi perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produksi dan meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien, akibat

penggunaan mesin tersebut maka penyerapan tenaga kerja menjadi rendah. Hubungan negatif antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja belum sesuai dengan yang diungkapkan dalam permintaan tenaga kerja, bahwa semakin tinggi investasi maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan.

### **5.3.3 Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil olahan data dalam penelitian ini pada model Random Effect Model, memperlihatkan hasil bahwa variabel UMP memiliki nilai koefisien sebesar 0.066475 dan t-hitung sebesar 3.136195 dengan probabilitas 0.0027 lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha 5% ( $0.0027 < 0.05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan upah minimum provinsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini berlawanan dengan hipotesis yang menyatakan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini artinya, naiknya upah minimum akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan begitu juga sebaliknya, turunnya upah minimum akan menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera. Itu artinya dengan upah minimum yang semakin meningkat maka permintaan pasar juga akan meningkat, sehingga perusahaan juga akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak untuk memenuhi permintaan pasar. Dengan begitu perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan membuka unit usaha yang baru. Peningkatan upah minimum mempengaruhi daya beli masyarakat yang mengakibatkan permintaan menjadi meningkat dan diikuti oleh banyaknya perusahaan yang masuk pasar sehingga penyerapan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan juga akan semakin meningkat dan karena adanya peningkatan upah maka perusahaan akan mengupayakan untuk meningkatkan atau menambah jumlah dari unit usahanya sehingga diharapkan dengan adanya penambahan dari jumlah unit usaha, pengusaha juga akan menambah jumlah dari tenaga kerjanya.

Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indradewa & Natha (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh (Warapsari et al., 2020) yang mengatakan upah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, oleh karena itu naiknya daya beli akan berdampak pada meningkatnya produksi pada perusahaan, sehingga pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

#### **5.4 Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. PDRB yang meningkat di Pulau Sumatera menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak dalam memproduksi barang dan jasa. Penelitian ini juga menunjukkan variabel Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Maksudnya, variabel investasi berpengaruh dalam menambah alat-alat produksi seperti mesin dalam mempermudah pekerjaan sekarang sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan sudah tidak terlalu banyak karena adanya mesin. Selain itu, variabel UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian ini, maka diperlukan adanya suatu kebijakan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di provinsi Pulau Sumatera. Berikut ini kebijakan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera yaitu :

1. Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan, dengan cara pemerintah memberikan bantuan pendanaan kepada usaha-usaha kecil dan menengah, memberikan bimbingan pengetahuan dan kemampuan jiwa berwirausaha sehingga mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi yang ada dan informasi pasar. Karena sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Jika industri pengolahan dapat bertumbuh baik secara terus menerus, maka akan mampu menyerap tenaga

kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran berkurang.

2. Menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa agar penggunaan tenaga kerja tidak sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Diharapkan dapat mendorong investasi pada sektor-sektor yang padat karya dengan tujuan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
3. Pemerintah menetapkan upah minimum provinsi, untuk mencapai kebijakan pendapatan masyarakat yang merata agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan. Pemerintah membuat kebijakan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas anggaran infrastruktur dan menarik investor agar bersedia menginvestasikan modalnya, dengan cara tersebut mampu memperbanyak dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di setiap daerah.
4. Kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia, pemerintah meluncurkan program dalam melatih tenaga kerja dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di Pulau Sumatera agar tenaga kerja ahli dan terampil. Untuk mendapatkan keterampilan atau keahlian dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka peluang untuk terserap dalam lapangan kerja akan semakin besar.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil estimasi dan penelitian data, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan variabel-variabel penelitian di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 cenderung berfluktuasi. Rata-rata perkembangan variabel PDRB adalah sebesar 3,22%, lalu pada variabel Investasi memiliki rata-rata perkembangan sebesar 12,03%, kemudian variabel UMP memiliki rata-rata perkembangan sebesar 5,32% dan rata-rata perkembangan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 yaitu sebesar 5,93%.
2. Berdasarkan hasil olah data regresi data panel yang menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Random Effect Model (REM), diperoleh variabel produk domestik regional bruto sektor industri pengolahan dan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, yaitu :

1. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan terus meningkatkan PDRB atau output dari sektor industri pengolahan dengan cara mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam meningkatkan produksinya. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan investasi sektor industri pengolahan yang berbentuk padat karya agar lebih banyak menyerap tenaga kerja. Diharapkan juga dapat meningkatkan penanaman investasi kepada umkm. Karena semakin besar investasi yang ditanamkan, maka akan meningkatkan kemampuan UMKM untuk memperbesar usahanya. Hal itu akan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga

penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Pemerintah harus terus mendorong wilayah yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian menjadi tujuan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah juga diharapkan harus adil dalam menerapkan penetapan nilai upah minimum yang tepat untuk meningkatkan kehidupan yang baik agar terciptanya hidup layak dan terciptanya kesejahteraan pekerja. Selain itu, kenaikan upah minimum diharapkan dapat memberikan insentif bagi pekerja dalam meningkatkan produktifitas serta kesejahteraannya. Upah minimum provinsi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan juga harus mendapatkan perhatian dan mempertimbangkan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah agar tidak menjadi beban bagi para pelaku usaha. Pemerintah juga diharapkan melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan membuat program dalam melatih keterampilan setiap pekerja.

2. Pemerintah diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan baru agar dapat menyerap tenaga kerja. Pemerintah diharapkan mempersiapkan langkah strategis dalam penyerapan tenaga kerja dengan mengembangkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, investasi dan daya saing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, J., & Fedryansyah, M. (2018). Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Asean Economy Community. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 77.
- Ali, G., Koleangan, R. A. M., & Siwu, H. F. D. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 1–11.
- Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal EP Unud*, 5(12), 1435–1462.
- Bayu, G., Bela, K., & Djinar Setiawina, N. (2019). Pengaruh Pad , Pmdn , Tenaga Kerja Dan Ipm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol 8 No 7, 1666–1696.
- Biamrillah, A., & Nurhayati, F. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Karesidenan Semarang. *STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta*, 325–340.
- Bustam, N. H. (2016). Pengaruh Jumlah Unit, PDB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Periode 2009-2013. *Kutubkhanah : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 250–261.
- Cahyadi, L. D. C. (2018). *Tenaga Kerja Industri Kreatif Di Kota Denpasar*. November, 313–318.
- Chusna, A. (2013). Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 14–23.
- Citamaha, A., & Pudjihardjo, M. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Besar Dan Sedang Pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015, 5(3), 248–253.
- Fadillah, D. D., & Priana, W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(9), 3010–3019.
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. STIM YKPN.
- Gujarati, D. N. dan Porter, D. C. (2009). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

- Gulo, B. J. K., Hia, I. T. S., Kartika, W., & Tanjung, A. A. (2022). Pengaruh Nilai Output Dan Jumlah Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 209–216.
- Haedzar P, R., Kusumastuti, S. Y., Nurfianingrum, E., & Syafri. (2022). Labour Absorption in the Manufacturing Industry Sector in Central Java Province Indonesia. *Asean International Journal of Business*, 1(1), 59–67.
- Hartono, R., Busari, A., & Awaluddin, M. (2018). Pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb) dan upah minimum kota (umk) terhadap penyerapan tenaga kerja. *Inovasi*, 14(1), 36–43.
- Hidayah, W., Militina, T., & Ulfah, Y. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Samarinda. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 12(1), 138–162.
- Inradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali”. *E-Jurnal EP Unud*, 4(8), 923–950.
- Jaya, T. J., & Kholilah. (2020). Effect of Gross Domestic Regional Bruto, Provincial Minimum Wage, and Investment on Labor Absorption. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(3), 236.
- Karib MS, A. (2012). Analisis Pengaruh Produksi, Investasi Dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(3), 53–73.
- Kawet, J. A., Masinambow, V. A. J., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(10).
- Kurniawati, V., Pudjihardjo, M., & Sakti, R. K. (2018). Analisa Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Ekspor dan Nilai Investasi Pada Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 53–67.
- Maghfiroh, A. A., Subagiarta, I. W., & Hanim, A. (2020). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 19.
- Matondang, M. A., Ruslan, D., & Maipita, I. (2019). Analysis of Labor Demand and Supply in North Sumatra. *Aisteel*, 181–185.
- Maulana, I., Pudjihardjo, & Susilo. (2020). Analysis of the effect Of invesment, wage levels, the number of industries On employment In the industrial sector In regencies cities In East Java Province. *International Journal of Business*,

*Economics and Law*, 23(1), 32–42.

- Melansena, E. V., Naukoko, A. T., & Tumangkeng, S. Y. L. (2021). Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri , Investasi Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 48–59.
- Muslihatinningsih, F., Walid, M., & Wayan, I. S. (2020). Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur (Labor Absorption in East Java Province). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, VII(1), 1–6.
- Ningrum, J. (2022). Permintaan Tenaga Kerja Perempuan Pada Industri Mikro Dan Kecil (Imk). *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 25–37.
- Nurfiat, N. A., & Rustariyuni, S. D. (2018). Pengaruh Upah dan Teknologi Terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kota Denpasar. *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 14(1), 34–48.
- Nurman, A. F., & Sentosa, S. U. (2020). Pengaruh Sektor Industri, Tingkat Pendidikan, dan Investasi Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 33.
- Nurtyas, F. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*. 5, 166–175.
- Penangsang, D. S. dan P. (2017). Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri Kecil, Investasi dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya Tahun 2005 - 2012. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 2(4), 71–85.
- Perindustrian, U.-U. N. 3 tahun 2014 T. (2014). Undang-Undang No 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian. In *Cell* (Vol. 3, Issue 4, pp. 1–15).
- Pramusinto, N. D., & Daerobi, D. (2020). The Juridical Analysis between Collective Labor Agreements between Employers and Trade Unions/ Labor Unions in the Company. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 3(1), 303–310.
- Purnawati, D. listri, & Khoirudin, R. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 43.
- Purwasih, & Soesatyo. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1–6.
- Putri, H. P., & Poerwono, D. (2013). Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2010.

*Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–10.

- Ramdani, A. N., Supadi, & Kadarwati, N. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah 2014-2019. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 23(2), 16–31.
- Renaldi, W., & Nurfahmiyati. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumbar. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 23–30.
- Rochmani, T. S., & dkk. (2016). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata. *Jiep*, 16(2), 50–61.
- Rosadi, A. (2022). Analisis Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian Kabupaten Donggala Tahun 2013-2018. *Journal of Indonesia Development and Economic Analysis*, 15(1), 62–72.
- Rusniati, R., Sudarti, S., & Agustin, A. F. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 34–42.
- Sitompul, T., & Simangunsong, Y. (2019). The Analysis of the Impact of GDP, FDI, Minimum Wage on Employment in Indonesia. *International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities*, 2(2), 53–62.
- Soelistyo, N. A. P. dan A. (2018). Analisis Pengaruh Upah, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di kawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 357–371.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksos*, 8, 195–211.
- Tumangkeng, S. (2018). Analisis Potensi Ekonomi Di Sektor Dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1), 12.
- Utomo, C. P. (2022). The Factors of Affecting Labor Absorption in Java Island. *Indonesian Journal of Development Economics*, 5(1), 1444–1452.
- Warapsari, E. B., Hidayat, W., & Rochminarni, A. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Pdrb, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(4), 747–761.
- Wasilaputri, F. R. (2016). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pdrb Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(3), 243–250.
- Widyaningrum, A., & Bintariningtyas, S. (2021). Pengaruh Upah Minimum,

PDRB dan Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Karesidenan Madiun pada Tahun 2017-2020. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 67–74.

Windayana, I. B. A. B., & Darsana, I. B. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umk, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1, 57.

Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 688–699.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. 1 Data Penelitian

Provinsi	Tahun	PDRB	INV	UMP	PTK
Aceh	2017	5.921,44	242.947,0	2.500.000	146.960
Aceh	2018	6.410,26	326.129,9	2.700.000	174.649
Aceh	2019	6.339,51	550.285,3	2.916.810	185.183
Aceh	2020	6.058,65	1.243.817,9	3.165.031	194.928
Aceh	2021	6.212,08	1.496.926,8	3.165.031	197.345
Aceh	2022	6.472,36	1.159.039,7	3.166.460	175.231
Sumatera Utara	2017	92.777,25	14.961.137,8	1.961.355	574.570
Sumatera Utara	2018	96.174,60	5.407.834,4	2.132.189	687.491
Sumatera Utara	2019	97.362,10	6.805.683,2	2.303.403	662.386
Sumatera Utara	2020	96.548,31	7.200.415,5	2.499.423	655.552
Sumatera Utara	2021	97.928,00	5.130.205,5	2.499.423	682.605
Sumatera Utara	2022	99.867,07	8.109.056,5	2.522.610	720.482
Sumatera Barat	2017	16.540,81	992.232,8	1.949.285	199.994
Sumatera Barat	2018	16.444,84	1.379.190,2	2.119.067	210.052
Sumatera Barat	2019	16.118,64	1.186.601,6	2.289.220	232.639
Sumatera Barat	2020	16.031,82	1.552.752,8	2.484.041	244.086
Sumatera Barat	2021	16.628,38	1.353.414,5	2.484.041	231.074
Sumatera Barat	2022	16.917,96	1.527.612,1	2.512.539	230.775
Riau	2017	139.717,11	17.863.754,1	2.266.723	198.468
Riau	2018	144.727,81	11.080.233,2	2.464.154	217.092
Riau	2019	153.155,81	17.537.083	2.662.026	231.736
Riau	2020	156.073,85	18.008.000,7	2.888.564	230.213
Riau	2021	162.436,92	24.448.723,8	2.888.564	257.595
Riau	2022	170.117,00	36.984.727,2	2.938.564	230.084
Jambi	2017	14.640,67	1.370.008,5	2.063.949	74.317
Jambi	2018	15.137,37	1.879.578,2	2.243.719	85.318
Jambi	2019	15.495,29	832.332,3	2.423.889	93.625
Jambi	2020	15.513,67	500.909,1	2.630.162	87.520
Jambi	2021	15.711,11	1.843.822,9	2.630.162	83.099
Jambi	2022	16.190,71	2.398.243,9	2.698.940	94.420
Sumatera Selatan	2017	53.270,83	11.167.996,1	2.388.000	279.370
Sumatera Selatan	2018	56.146,10	10.841.506,6	2.595.995	578.353
Sumatera Selatan	2019	58.852,89	3.197.455,5	2.804.453	539.411
Sumatera Selatan	2020	59.276,64	11.434.379,2	3.043.111	524.583
Sumatera Selatan	2021	60.571,42	2.002.833,1	3.043.111	565.604

Sumatera Selatan	2022	63.231,36	8.972.427,3	3.144.446	565.834
Bengkulu	2017	2.625,19	60.558,2	1.730.000	48.474
Bengkulu	2018	2.718,55	229.615	1.888.741	52.647
Bengkulu	2019	2.781,32	1.015.271,4	2.040.407	57.322
Bengkulu	2020	2.713,44	737.102,3	2.213.604	55.954
Bengkulu	2021	2.777,63	903.095,3	2.213.604	58.588
Bengkulu	2022	2.863,15	1.443.054,3	2.238.094	53.218
Lampung	2017	39.633,96	1.669.643,5	1.908.448	605.893
Lampung	2018	43.218,14	1.984.600,9	2.074.673	659.987
Lampung	2019	46.778,09	1.587.094,3	2.241.270	756.375
Lampung	2020	44.336,28	2.086.888,3	2.432.002	670.282
Lampung	2021	46.351,00	1.929.385,5	2.432.002	690.275
Lampung	2022	46.566,85	4.443.821,1	2.440.486	668.876
Kep.Bangka Belitung	2017	11.337,67	795.202,7	2.534.674	42.623
Kep.Bangka Belitung	2018	11.787,74	585.779,7	2.755.444	47.834
Kep.Bangka Belitung	2019	11.928,98	1.017.907,3	2.976.706	54.396
Kep.Bangka Belitung	2020	11.259,12	732.950,3	3.230.024	57.293
Kep.Bangka Belitung	2021	11.873,92	1.838.685,4	3.230.024	53.363
Kep.Bangka Belitung	2022	12.485,31	2.209.157,3	3.264.884	50.185
Kep.Riau	2017	62.436,28	4.873.918,9	2.358.454	191.572
Kep.Riau	2018	65.018,04	11.045.651,4	2.563.875	232.552
Kep.Riau	2019	69.079,81	16.703.811,8	2.769.754	246.487
Kep.Riau	2020	71.325,79	24.900.246,5	3.005.460	231.405
Kep.Riau	2021	75.925,35	10.918.452,4	3.005.460	271.944
Kep.Riau	2022	79.378,16	12.185.630,8	3.050.172	297.852

## LAMPIRAN 2

### Lampiran 2. 1 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: PTK?  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 09/20/23 Time: 23:49  
Sample: 2017 2022  
Included observations: 6  
Cross-sections included: 10  
Total pool (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB?	4.764357	1.003150	4.749394	0.0000
INV?	-0.019938	0.006429	-3.101071	0.0030
UMP?	-0.035927	0.067979	-0.528498	0.5992
C	272219.0	176139.8	1.545471	0.1279
R-squared	0.318582	Mean dependent var		291634.0
Adjusted R-squared	0.282077	S.D. dependent var		232063.3
S.E. of regression	196628.0	Akaike info criterion		27.28036
Sum squared resid	2.17E+12	Schwarz criterion		27.41998
Log likelihood	-814.4107	Hannan-Quinn criter.		27.33497
F-statistic	8.727174	Durbin-Watson stat		0.235571
Prob(F-statistic)	0.000077			

## Lampiran 2. 2 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 09/20/23 Time: 23:16

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-56903.28	61262.33	-0.928846	0.3577
PDRB	4.734012	1.570315	3.014689	0.0041
INV	-0.004762	0.001430	-3.330297	0.0017
UMP	0.058617	0.023570	2.486986	0.0165

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.981987	Mean dependent var	291634.0
Adjusted R-squared	0.977388	S.D. dependent var	232063.3
S.E. of regression	34895.89	Akaike info criterion	23.94726
Sum squared resid	5.72E+10	Schwarz criterion	24.40104
Log likelihood	-705.4179	Hannan-Quinn criter.	24.12476
F-statistic	213.5213	Durbin-Watson stat	2.316506
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Lampiran 2. 3 Hasil Regresi Random Effect Model

Dependent Variable: PTK?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 09/20/23 Time: 23:55

Sample: 2017 2022

Included observations: 6

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 60

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB?	3.630268	1.061045	3.421410	0.0012
INV?	-0.004514	0.001376	-3.279428	0.0018
UMP?	0.066475	0.021196	3.136195	0.0027
C	-25800.08	82934.49	-0.311090	0.7569
Random Effects (Cross)				
_ACEH_--C	-9104.134			
_SUMUT_--C	218793.5			
_SUMBAR_--C	43333.19			
_RIAU_--C	-388782.2			
_JAMBI_--C	-99498.58			
_SUMSEL_--C	168459.0			
_BENGKULU_--C	-62717.08			
_LAMPUNG_--C	397939.2			
_KEPBANGBEL_--C	-159108.7			
_KEPRIAU_--C	-109314.1			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		196824.2	0.9695
Idiosyncratic random		34895.89	0.0305

Weighted Statistics			
R-squared	0.388629	Mean dependent var	21053.47
Adjusted R-squared	0.355877	S.D. dependent var	44600.47
S.E. of regression	35795.14	Sum squared resid	7.18E+10
F-statistic	11.86579	Durbin-Watson stat	1.868665
Prob(F-statistic)	0.000004		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.144432	Mean dependent var	291634.0
Sum squared resid	2.72E+12	Durbin-Watson stat	0.049323

### Lampiran 3

#### Lampiran 3. 1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: MODEL\_FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	192.332711	(9,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	217.985620	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PTK?

Method: Panel Least Squares

Date: 09/20/23 Time: 23:58

Sample: 2017 2022

Included observations: 6

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB?	4.764357	1.003150	4.749394	0.0000
INV?	-0.019938	0.006429	-3.101071	0.0030
UMP?	-0.035927	0.067979	-0.528498	0.5992
C	272219.0	176139.8	1.545471	0.1279
R-squared	0.318582	Mean dependent var		291634.0
Adjusted R-squared	0.282077	S.D. dependent var		232063.3
S.E. of regression	196628.0	Akaike info criterion		27.28036
Sum squared resid	2.17E+12	Schwarz criterion		27.41998
Log likelihood	-814.4107	Hannan-Quinn criter.		27.33497
F-statistic	8.727174	Durbin-Watson stat		0.235571
Prob(F-statistic)	0.000077			

### Lampiran 3. 2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: MODEL\_REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.923362	3	0.1154

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB?	4.734012	3.630268	1.340074	0.3404
INV?	-0.004762	-0.004514	0.000000	0.5215
UMP?	0.058617	0.066475	0.000106	0.4459

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PTK?

Method: Panel Least Squares

Date: 09/20/23 Time: 23:59

Sample: 2017 2022

Included observations: 6

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-56903.28	61262.33	-0.928846	0.3577
PDRB?	4.734012	1.570315	3.014689	0.0041
INV?	-0.004762	0.001430	-3.330297	0.0017
UMP?	0.058617	0.023570	2.486986	0.0165

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.981987	Mean dependent var	291634.0
Adjusted R-squared	0.977388	S.D. dependent var	232063.3
S.E. of regression	34895.89	Akaike info criterion	23.94726
Sum squared resid	5.72E+10	Schwarz criterion	24.40104
Log likelihood	-705.4179	Hannan-Quinn criter.	24.12476
F-statistic	213.5213	Durbin-Watson stat	2.316506
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Lampiran 3. 3 Hasil Uji Langrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided  
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	103.9107 (0.0000)	1.423425 (0.2328)	105.3341 (0.0000)
Honda	10.19366 (0.0000)	-1.193074 (0.8836)	6.364376 (0.0000)
King-Wu	10.19366 (0.0000)	-1.193074 (0.8836)	5.135290 (0.0000)
Standardized Honda	12.29555 (0.0000)	-0.958275 (0.8310)	4.668790 (0.0000)
Standardized King-Wu	12.29555 (0.0000)	-0.958275 (0.8310)	3.287658 (0.0005)
Gourieroux, et al.	--	--	103.9107 (0.0000)